

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

4.1 PERMASALAHAN

Permasalahan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan yaitu adanya perbedaan antara kinerja yang ditargetkan dengan yang terjadi sehingga harus dilakukan penyelesaiannya. Dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Provinsi Banten 2017-2022 ini, kerangka yang harus dipahami oleh pemangku kepentingan tentang permasalahan sebagai berikut :

1. Permasalahan yang didefinisikan merujuk dari Bab 2 tentang gambaran kondisi umum daerah yaitu kinerja pembangunan yang telah di capai pada periode sebelumnya, kemudian membuat capaian kinerja baru dan kinerja pembangunan yang belum tercapai, serta berusaha dicapai pada periode berikutnya.
2. Tema permasalahan yang diangkat berasal dari urusan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah meliputi urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, dan urusan pilihan.
3. Permasalahan disampaikan dalam deskripsi pernyataan dan didukung dengan indikasi perangkat yang menjadi perbedaan antara yang terjadi saat ini dengan yang hendak dicapai dalam periode lima tahun.
4. Permasalahan yang disampaikan harus memiliki hubungan logis dan rasional untuk dapat di selesaikan melalui pernyataan dalam indikator kinerja utama yaitu sesuatu yang akan dirubah, *outcome* yaitu sesuatu yang akan dicapai, dan *output* yaitu sesuatu yang akan dikerjakan.
5. Permasalahan yang diselesaikan melalui indikasi pencapaian indikator kinerja utama dalam ruang lingkup struktur, tugas pokok dan fungsi yang terkait. Setiap tingkatan struktur, tingkat eselon dua, eselon tiga dan eselon empat, mengemban penyelesaian permasalahannya dengan indikasi pencapaian indikator kinerja utamanya. Karenanya setiap tingkatan eselon harus tahu dan memahami benar, untuk apa keberadaan dan fungsi Perangkat Daerah, tugas dan fungsi kepala Perangkat Daerah, tugas dan fungsi kepala bidang, tugas dan fungsi kepala seksi/ kasubag terhadap masalah-masalah yang baru, masalah

yang belum selesai pada periode sebelumnya dan antisipasi masalah baru pada periode yang akan datang, dengan melihat pada Bab II Gambaran umum Kondisi Daerah, pencapaian kinerja kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

6. Pada Bab II Gambaran umum kondisi daerah, pada pencapaian data indikator kinerja kesejahteraan masyarakat, pencapaian data indikator kinerja pelayanan umum dan pencapaian data indikator kinerja daya saing, merupakan data hasil capaian kinerja periode RPJMD Provinsi Banten periode 2012-2017, yang menjadi dasar RPJMD Provinsi Banten periode 2017-2022 pada target indikator kinerja utamanya.

Fungsi penetapan indikator kinerja utama pada sebuah urusan merupakan cara mengindikasikan solusi penyelesaian suatu permasalahan setelah melalui proses identifikasikan dengan cermat terhadap permasalahan urusan tersebut. Identifikasi permasalahan tergambar dengan deskriptif dan perangkatannya yang merujuk pada Bab II disetiap urusan pelayanan, harus menjadi tanggung jawab dan sangat dipahami Perangkat Daerah pada tingkat kepala Dinas, Kepala Badan, Kepada Bidang/Bagian sampai Kepala Seksi/Kasubag, sehingga setiap tingkatan struktur Perangkat Daerah tersebut mengemban indikator kinerja utamanya merupakan indikasi penyelesaian permasalahan pada urusan pelayanan selama periode RPJMD Provinsi Banten periode 2017-2022.

Pentingnya setiap tingkatan struktur Perangkat Daerah memahami permasalahannya dan mengemban indikator kinerja utamanya, yang merupakan indikasi penyelesaian permasalahan urusan pelayanan karena akan sangat terkait pada capaian kinerja RPJMD Provinsi Banten periode 2017-2022 yaitu:

Keterkaitan pemahaman capaian kinerja daerah yang menjadi rujukan identifikasi permasalahan pada Bab II, kemudian dirumuskan permasalahannya pada Bab IV, dirumuskan visi, misi, tujuan sasaran pembangunan sebagai indikasi prioritas solusi permasalahan dalam pembangunan pada Bab V, dan ditetapkan arah kebijakan serta indikator kinerja utamanya pada Bab VI, kemudian permasalahan diselesaikan dengan program pembangunan daerah beserta indikator kinerja utamanya, kemudian dilakukan penataan program pembangunannya pada setiap urusan pelayanan, indikator kinerja

utamanya dan indikasi kegiatan yang mendukung pencapaian kinerjanya disertai indikasi pendanaannya pada Bab VII. Detail indikator kinerja daerah di jabarkan pada Bab VIII.

Rangkaian tersebut merupakan hubungan sebab akibat, sebab yang belum tepat menentukan permasalahannya akan berakibat salah sasaran dalam menentukan kebijakan program dan kegiatannya serta yang mengemban indikator kinerja utamanya.

Berikut ini tabel permasalahannya urusan pelayanan yang mengarahkan pada indikasi pencapaian kinerjanya dan struktur yang harus mengemban penyelenggaraan solusinya.

Tabel 4.1
Permasalahan Urusan

NO	URUSAN	PERMASALAHAN		SKPD PENANGGUNG JAWAB			
1	Pendidikan			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
		Masih rendahnya Rata-rata lama sekolah dibanten		KADIS			
		Masih rendahnya Harapan lama sekolah					
			Belum baiknya mutu kelulusan SMA			KABID SMA	
			Masih tingginya angka putus sekolah SMA				
			Masih rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA				
			Masih rendahnya Angka Partisipasi Murni (APM) SMA				
			Masih rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMK		KABID SMK		
			Masih rendahnya Angka Partisipasi Murni (APM) SMK				
			Belum baiknya mutu kelulusan SMK				
			Masih tingginya angka putus sekolah SMK				
		Masih rendahnya Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Khusus			KABID Pendidikan Khusus		
		Kurangnya Rasio Ketersediaan Guru dan Murid pada Jenjang Pendidikan Menengah dan Khusus			KABID Ketenagaan dan Kelembagaan		
		Distribusi Guru belum merata					
		Masih rendahnya kompetensi guru					
		Belum terpenuhinya kebutuhan tenaga kependidikan					
		Minimnya ketersediaan lembaga pendidikan menengah					
		2	Kebudayaan				

NO	URUSAN	PERMASALAHAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	
		Masih rendahnya Pelestarian dan Pemanfaatan Nilai Budaya Daerah	KADIS	
		Masih kurangnya Pelestarian Event Masyarakat Adat		KABID Pembinaan Kebudayaan
		Kurangnya pembinaan organisasi kesenian (sanggar/ kelompok seni dan budaya)		
3	Kesehatan		DINAS KESEHATAN	
		Masih rendahnya Angka Harapan Hidup	KADIS	
		Minimnya Pembangunan fasilitas Pelayanan Kesehatan		KABID Pelayanan Kesehatan
		Belum optimalnya Pengembangan Rumah Sakit Rujukan Regional		
		Masih tingginya Angka Kematian Ibu		KABID Kesehatan Masyarakat
		Masih tingginya Angka Kematian Bayi		
		Belum optimalnya Kinerja Pencegahan dan Pengendalian Penyakit		KABID Pencegahan dan penanggulangan penyakit
		Belum optimalnya kinerja SDM kesehatan dan Kefarmasian serta keterbatasan tenaga medis dan para medis		KABID Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian
4.a	Pekerjaan Umum dan Penataan ruang		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		Belum Terwujudnya Sistem Jaringan Jalan Yang Andal serta Terpadu dan Berbasis Penataan Ruang Yang Berkelanjutan	KADIS	
		Kondisi Jaringan jalan Provinsi belum Mantap		KABID Bina Marga
		Kondisi Jembatan Provinsi belum Mantap		
		Belum tersedia Perda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis provinsi Banten		KABID Penataan Ruang
		Belum optimalnya pembinaan Jasa Konstruksi		KABID Jasa Konstruksi
		Belum efektifnyapenanggulangan dan pemulihan banjir dan abrasi		KABID Pengelolaan Jaringan Sumber Daya Air
		Belum optimalnya penyediaan air baku		
		Belum optimalnya Luas layanan jaringan irigasi teknis (Ha)		KABID Pengelolaan Jaringan Pemanfaatan Air
4.b	Perumahan dan Pemukiman		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		Kurang optimalnya penanganan persampahan regional	KABID Infrastruktur Permukiman	

NO	URUSAN	PERMASALAHAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	
		Masih kurang optimalnya penanganan air limbah domestik (Rumah tangga) regional.		
		Masih kurang optimalnya penanganan air bersih lintas kabupaten / kota.		
		Masih belum optimalna infrastruktur di kawasan strategis daerah provinsi		
		Belum optimalnya penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategi daerah provinsi		
		Belum optimalnya penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkukungan di kawasan strategi provinsi serta lintas daerah kabupaten kota		
5	Perumahan dan Pemukiman		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		Masih banyak kawasan kumuh yang belum tertangani	KADIS	
		Tingginya Backlog (kepemilikan rumah) di provinsi Banten		KABID Perumahan
		Kurangnya Penataan Kawasan Permukiman		KABID Kawasan Permukiman
		Kurangnya sediaan Air bersih Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat		KABID Infrastruktur Permukiman
7	Ketentraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
		Belum efektifnya Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum	KADIS	
		Belum efektifnya penanganan daerah rawan bencana		
		Masih kurangnya upaya penegakan Peraturan Perundang-undangan		KABID Penegakan Perundang-Undangan Daerah
		Belum optimalnya Pengamanan, Pengawalan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris daerah		KABID Ketentraman dan dan Ketertiban Umum
		Kurangnya Kompetensi anggota dalam pelayanan		KABID Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas
		Belum optimalnya Pelayanan Bencana Kebakaran		KABID Pemadam kebakaran
8	Sosial		DINAS SOSIAL	
		Masih tingginya jumlah PMKS	KADIS	
		Belum efektifnya Penanganan korban bencana		
		Masih kurangnya bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan		KABID Rehabilitasi Sosial
		Kurangnya Ketersediaan Data Kemiskinan, PMKS dan PSKS		KABID Perlindungan & Jaminan

NO	URUSAN	PERMASALAHAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	
		Belum optimalnya Bantuan Korban Bencana		Sosial
		Minimnya Masyarakat yang mendapat Jaminan Sosial		
		Belum optimalnya pemberdayaan sosial terhadap masyarakat		KABID Pemberdayaan Sosial
		Kurangnya Kelembagaan Kesejahteraan Sosial yang dibina		
		Masih kurangnya Pemberdayaan Keluarga yang dibina		
		Belum optimalnya masyarakat miskin yang memperoleh pemberdayaan social		KABID Penanganan Fakir Miskin
9	Tenaga Kerja		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		Masih minimnya partisipasi Angkatan Kerja	KADIS	
		Masih kurangnya Hubungan Industrial, Kesejahteraan Pekerja dan Perlindungan Tenaga Kerja		
		Belum meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja		KABID Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja
		Masih kurangnya Pelatihan dan Kompetensi Kerja		
		Belum baiknya Hubungan Industrial		KABID Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
		Belum baiknya Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja (normatif)		
		Masih rendahnya kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja		KABID Pengawasan Ketenaga Kerjaan
		Kurangnya Perlindungan Kondisi Lingkungan Kerja		KABID Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Masih rendahnya Kesempatan Kerja		
		Belum optimalnya Persiapan, Pemetaan dan Pengembangan Permukiman Transmigrasi		
10	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	
		Masih rendahnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	KADIS	
		Masih rendahnya Indeks Pembangunan Gender (IPG)		
		Belum terpenuhinya Data Terpilah Gender dan Anak		KABID Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
		Belum efektifnya Perencanaan Responsif Gender		
		Kurangnya Partisipasi perempuan di lembaga legislatif, swasta dan pemerintah		
		Banyaknya Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)		KABID Perlindungan Perempuan dan Anak
		Masih banyaknya Kasus Kekerasan Terhadap Anak		

NO	URUSAN	PERMASALAHAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	
		Kurangnya penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan Belum meningkatnya perlindungan hak perempuan Kurangnya Perlindungan Khusus Anak Masih kurangnya Pemenuhan Hak Anak		
11	Pengendalian Penduduk, Kependudukan dan Catatan Sipil		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	
	Belum meningkatnya Penggunaan Alat Kontrasepsi / CPR		KADIS	
		Kurangnya Peserta KB baru Meningkatnya penduduk migrasi antar provinsi dan antar kabupaten/ kota penduduk 5 tahun ke atas Masih tingginya Keluarga Pra Sejahtera Masih kurangnya bayi berakte kelahiran Masih kurangnya Pasangan berakte nikah Belum optimalnya kepemilikan e-KTP Masih rendahnya kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk Belum baiknya profil kependudukan		KABID Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana KABID Kependudukan dan Catatan Sipil
12	Pemberdayaan masyarakat dan desa		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	Masih banyaknya Jumlah Desa Tertinggal Belum meningkatnya Jumlah Desa Mandiri		KADIS	
		Belum optimalnya penataan, pembinaan dan pengembangan kerjasama Lembaga Desa dan Pemerintahan Desa		KABID Penataan dan Kerjasama Desa
		Belum optimalnya upaya realisasi lembaga kemasyarakatan desa katagori baik		KABID Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
		Belum optimalnya upaya realisasi masyarakat desa yang berhasil setelah diberdayakan		KABID Pemberdayaan Masyarakat Desa
13	Pangan		DINAS KETAHANAN PANGAN	
	Belum terpenuhinya ketersediaan pangan		KADIS	
		Masih kurangnya ketersediaan bahan pangan		KABID Penyelenggara n Ketahanan Pangan

NO	URUSAN	PERMASALAHAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	
		Banyaknya masalah distribusi pangan yang belum terselesaikan		KABID Keterjangkauan Pangan
		Masih kurangnya konsumsi energi dan konsumsi protein		KABID Konsumsi dan Keamanan Pangan
14	Kelautan dan Perikanan		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
		Rendahnya kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	KADIS	
		Kurangnya Pemanfaatan Sumber daya Kelautan yang sesuai dengan Zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil		KABID Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil
		Belum terkelolanya ruang laut, pesisir, pulau-pulau kecil dan kawasan konservasi		
		Masih kurangnya Produksi Perikanan Tangkap		KABID Perikanan Tangkap
		Lambatnya peningkatan jumlah kelompok usaha mandiri		KABID Peningkatan Daya Saing
		Lambatnya peningkatan jumlah produk perikanan yang berlogo SNI		
		Kurangnya Penanganan Pelanggaran Sumberdaya Kelautan dan Perikanan		KABID Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
		Belum maksimalnya luas laut yang terawasi		
15	Lingkungan Hidup dan Kehutanan		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		Belum meningkatnya Indeks Kualitas Air	KADIS	
		Masih rendahnya Indeks Kualitas Udara		
		Masih kurangnya luas area rehabilitasi hutan dan lahan		
		Belum optimalnya Fungsi Hutan dan Kawasan Lindung		
		Kurangnya Ketaatan usaha/kegiatan terhadap peraturan perundangan dan ketentuan izin		KABID Penataan dan Peningkatan Kapasitas
		Rendahnya Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Lingkungan Hidup		
		Masih kurangnya Ketaatan Industri Terhadap Baku Mutu Air Limbah dan Emisi Udara		KABID Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran
		Belum maksimalnya pemanfaatan teknologi terapan bidang kehutanan		KABID Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
		Masih kurangnya kemantapan tata usaha dan pembinaan industri kehutanan		

NO	URUSAN	PERMASALAHAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	
		Kurangnya pengendalian penggunaan kawasan hutan		
		Minimnya Kesadaran masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan		KABID Pengelolaan DAS, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat
		Belum meningkatnya fungsi hutan dan kawasan lindung		
16	Perhubungan		DINAS PERHUBUNGAN	
		Masih kurangnya keselamatan dan kenyamanan di jalan raya	KADIS	
		Belum optimalnya pembinaan, pemantauan dan pengendalian angkutan darat.		KABID Angkutan dan Teknik Sarana Prasarana
		Masih tingginya angka kecelakaan pada LLAJR di Ruas Jalan Provinsi		KABID Lalulintas
		Kurangnya pengembangan sistem transportasi wilayah		KABID Pengembangan Transportasi
		Belum optimal pengembangan angkutan multi moda		
		Belum optimalnya pengelolaan kawasan di sekitar bandar udara dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan		KABID Perhubungan Laut dan Udara
		Belum tersedianya pelabuhan pengumpan regional		
17	Komunikasi dan informatika		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
		Belum optimalnya aksesibilitas serta kapasitas Telekomunikasi, informasi dan teknologi informatika	KADIS	
		Masih kurangnya Ketersediaan Perangkat Teknologi Informasi		KABID Teknologi Informasi dan Komunikasi
		Belum optimalnya realisasi data Rencana Induk Komunikasi		KABID Aplikasi Informatika dan Komunikasi Publik
		Masih kurangnya Pelayanan dalam Penyebarluasan Informasi Pembangunan		
18	Statistik dan Persandian		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
		Belum meningkatnya penyelenggaraan dan pelayanan Statistik	KADIS	
		Belum meningkatnya dukungan layanan Persandian		
		Belum baiknya kinerja persandian statistik dan layanan Pengadaan		KABID Persandian Statistik dan Layanan Pengadaan
		Belum optimalnya pemanfaatan Data pembangunan Daerah		
19	Koperasi dan UKM		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
		Masih kurangnya realisasi Koperasi aktif dan sehat dalam kewenangan provinsi	KADIS	

NO	URUSAN	PERMASALAHAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	
		Masih minimnya Realisasi usaha kecil yang menjadi usaha menengah		
		Masih kurangnya realisasi tingkat kesehatan koperasi KSP/USP dan KSPPS/ UKSPPS		KABID Kelembagaan dan Pengawasan
		Masih sedikitnya koperasi aktif binaan yang cukup berkualitas		
		Masih kurangnya realisasi kinerja koperasi binaan (volume usaha, kapasitas produksi, aset dan keuntungan)		KABID Pemberdayaan Koperasi
		Masih rendahnya Laju Pertumbuhan Omset UKM		KABID Pemberdayaan Usaha Kecil
20	Penanaman Modal		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		Masih rendahnya realisasi PMA	KADIS	
		Masih kurangnya realisasi PMDN		
		Masih kurangnya minat calon investor		KABID Promosi dan Pembinaan BUMD
		Masih kurangnya MOU kerjasama investasi		
		Belum optimalnya sistem informasi penanaman modal daerah		KABID Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
		Kurang efektifnya pengendalian dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal		KABID Pengendalian Penanaman Modal
		Belum optimalnya Penerbitan perizinan dan non perizinan		KABID Pelayanan
		Masih kurangnya pengaduan yang terlayani		
21	Olah Raga dan Kepemudaan		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
		Masih kurangnya Cabang Olahraga Berprestasi tingkat nasional	KADIS	
		Masih lemahnya pembinaan organisasi Kepemudaan		
		Masih lemahnya pembinaan kepramukaan		
		Masih kurangnya Penyelenggaraan Olahraga Massal		KABID Pemberdayaan Olah Raga
		Kurangnya Keikutsertaan provinsi banten pada event wilayah, nasional dan internasional		KABID Prestasi Olah Raga
		Belum efektifnya pembinaan Kelompok/ Organisasi Kepemudaan dan kewirausahaan pemuda		KABID Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda
22	Perpustakaan dan Kearsipan		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
		Masih kurangnya kepuasan pengunjung perpustakaan provinsi	KADIS	

NO	URUSAN	PERMASALAHAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	
		Belum optimalnya SKPD Propinsi yang pengelolaan arsipnya sesuai dengan ketentuan		
		Masih rendahnya jumlah pengunjung perpustakaan		KABID Deposit, Pengembangan Koleksi dan Layanan Perpustakaan
		Masih sedikitnya Jumlah Perpustakaan Sesuai Standar Nasional		KABID Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan dan Kearsipan
		Belum optimalnya penyelenggaraan layanan kearsipan		
		Masih kurangnya khasanah arsip Statis di Depo Arsip Banten		KABID Pengelolaan Arsip
23	Pariwisata		DINAS PARIWISATA	
		Belum meningkatnya Kunjungan Wisatawan	KADIS	
		Belum bertambah dan berkembangnya destinasi daya tarik wisata		KABID Destinasi Pariwisata
		Kurangnya promosi wisata dalam negeri dan luar negeri		KABID Pemasaran Produk Pariwisata
		Belum berkembangnya Industri ekonomi kreatif		KABID Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		Belum berkembangnya Industri pariwisata sebagai destinasi utama		
		Masih rendahnya kapasitas dan kualitas SDM ekonomi kreatif		KABID Sumber Daya Manusia Kebudayaan dan Pariwisata
		Masih rendahnya kapasitas dan kualitas SDM pariwisata untuk dapat bersaing		
24	Pertanian		DINAS PERTANIAN	
		Rendahnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	KADIS	
		Belum terpenuhinya sarana prasarana produksi pertanian		KABID Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian
		Masih kurangnya produktifitas tanaman padi		KABID Tanaman Pangan
		Belum meningkatnya produktifitas komoditas Buah, sayuran, bunga dan tanaman obat-obatan		KABID Hortikultura
		Masih kurangnya penerapan Inovasi Teknologi Hortikultura		
		Masih kurangnya produktifitas tanaman perkebunan serta kawasan komoditas perkebunan		
		Masih kurangnya produksi daging (Non Impor)		KABID Perkebunan

NO	URUSAN	PERMASALAHAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	
		Masih kurangnya produksi Hijauan Pakan Ternak (HPT)		KABID Produksi Peternakan
		Kurangnya Penerapan Teknologi Peternakan		
		Kurangnya Pengawasan Obat Hewan dan Produk Asal Hewan		
		Belum adanya Penjaminan Keamanan Pangan Asal Hewan		KABID Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
		Kurangnya Pengendalian Penyakit Hewan Menular (PHM)		
		Belum terpenuhinya sarana prasarana produksi pertanian		
25	Energi dan Sumberdaya Mineral		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
		Belum efektifnya Pengendalian dan Perijinan Bidang Pertambangan	KADIS	
		Belum Optimalnya pemanfaatan energi terbarukan		
		Masih kurangnya Regulasi Geologi dan Air Tanah		KABID Geologi dan Air Tanah
		Kurangnya Pembinaan dan Pengendalian Geologi dan Air Tanah		
		Masih kurangnya Regulasi Mineral dan Batubara		KABID Mineral dan Batubara
		Kurangnya Pembinaan dan Pengendalian Mineral dan Batubara		
		Masih kurangnya Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan		KABID Pengembangan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan
		Belum efektifnya rencana dan Pengendalian Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan		
		Kurangnya pembinaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ketenagalistrikan		KABID Pemanfaatan Ketenagalistrikan
		Kurangnya Regulasi Pemanfaatan Ketenagalistrikan		
26	Industri dan Perdagangan		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		Masih lambatnya pertumbuhan Usaha Perdagangan	KADIS	
		Belum optimalnya pembangunan industri Provinsi Banten		
		Masih rendahnya Kinerja UPT Industri dan UPT Perdagangan		
		Kurangnya penguatan Struktur Industri pada Industri Unggulan Daerah		KABID Perindustrian
		Masih minimnya Kerjasama SDM berkompetensi Industri		
		Belum efektifnya Pembinaan Pelaku Usaha Perdagangan		KABID Perdagangan Dalam Negeri
		Masih rendahnya nilai transaksi penjualan ke luar negeri		KABID Perdagangan Luar Negeri

NO	URUSAN	PERMASALAHAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	
		Masih kurangnya Mutu/Daya Saing, Standarisasi dan Sertifikasi Produk		KABID Pengawasan
		Belum optimalnya Perlindungan Konsumen, dan Pengawasan Barang Beredar/Jasa		
27	Pendapatan daerah		BADAN PENDAPATAN DAERAH	
		Belum optimalnya Pendapatan Asli Daerah	KABAN	
		Belum efektifnya perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah terhadap potensi daerah yang tersedia		KABID Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah
		Masih kurangnya Ketersediaan jumlah sistem/data/dokumen/informasi penunjang peningkatan pendapatan daerah		
		Masih kurangnya ketersediaan regulasi pengelolaan pendapatan daerah dan ketatalaksanaan badan		
		Belum optimalnya pendapatan pajak daerah		KABID Pendapatan Pajak Daerah
		Belum optimalnya Potensi Wajib Pajak Daerah		
		Belum tersedianya regulasi pengelolaan pajak daerah dan ketatalaksanaan badan		
		Masih rendahnya hasil Retribusi Daerah		KABID Retribusi Daerah dan pendapatan Lain-lain
		Belum optimalnya Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah		
		Masih kurangnya ketersediaan regulasi pengelolaan bagi hasil pajak/non pajak		
28	Administrasi Keuangan Daerah		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
		Belum optimalnya pengelolaan keuangan pemerintah terhadap pencapaian kinerja daerah	KABAN	
		Belum Optimalnya pengelolaan keuangan dan aset daerah		
		Belum Optimalnya pelayanan perbendaharaan dan anggaran		KABID Perbendaharaan dan Anggaran
		Masih kurangnya pelaksanaan manajemen aset daerah		KABID Aset Daerah
29	Kepegawaian		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
		Masih rendahnya kinerja pegawai dengan kategori baik	KABAN	
		Belum optimalnya pegawai yang didistribusikan sesuai hasil pemetaan		KABID Perencanaan dan Mutasi Pegawai

NO	URUSAN	PERMASALAHAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	
		Belum optimalnya penempatan pegawai sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya		KABID Pengembangan Sumberdaya Aparatur
		Kurangnya akurasi data kepegawaian		KABID Pembinaan dan Data Kepegawaian
		Belum optimalnya penanganan pegawai yang melanggar kode etik dan disiplin pegawai		
30	Sumber Daya Aparatur		BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA DAERAH	
		Belum Optimalnya layanan kediklatan	KADIS	
		Belum optimalnya Akreditasi BPSDMD		
		Kurangnya Ketersediaan Bahan Penunjang Kediklatan dan Bimtek Aparatur		KABID Sertifikasi Kompetensi dan Pengendalian Mutu Diklat
		Masih kurangnya kompetensi dan profesionalisme penyelenggara diklat		KABID Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional
		Masih kurangnya peserta Diklat Teknis Umum, Substantif, dan Fungsional yang lulus berkategori baik		
		Masih kurangnya peserta Diklat kepemimpinan dan prajabatan, manajemen dan pemerintahan yang lulus berkategori baik		KABID Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Pemerintahan
31	Perencanaan Pembangunan		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		Kualitas perencanaan pembangunan daerah yang belum optimal	KABAN	
		Belum optimalnya Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		KABID Perekonomian
		Belum optimalnya Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang sosial dan pemerintahan		KABID Sosial dan Pemerintahan
		Belum optimalnya Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		KABID Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
		Belum efektifnya Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah		KABID Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan
		Masih kurangnya penelitian yang dimanfaatkan		KABID Penelitian dan Pengembangan
		Belum lengkapnya ketersediaan Data pembangunan Daerah		
32	(Pengawasan)		INSPEKTORAT PROPINSI	
		Belum optimalnya Temuan BPKP yang ditindaklanjuti	INSPEKTUR	

NO	URUSAN	PERMASALAHAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	
		Belum efektifnya pembinaan dan pengawasan		
		Belum optimalnya Temuan Itjen kementerian yang ditindaklanjuti		
		Belum optimalnya Temuan BPK yang ditindaklanjuti		
		Masih rendahnya tindak Lanjut LHP		Inspektur Pembantu I
		Belum efektifnya Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan		Inspektur Pembantu II
		Masih rendahnya tindak Lanjut LHP		
		Belum efektifnya Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan		Inspektur Pembantu III
		Masih rendahnya tindak Lanjut LHP		
		Belum efektifnya Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan		Inspektur Pembantu IV
		Masih rendahnya tindak Lanjut LHP		
		Belum efektifnya Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan		
33	DPRD		SEKRETARIAT DEWAN	
		Belum optimalnya pelayanan penyelenggaraan administrasi, pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	KEPALA	
		Belum Maksimalnya Fungsi Legislasi		KaBag Hukum dan Persidangan
		Belum tepatnya laporan Akuntabilitas Kegiatan		KaBag Keuangan
		Belum efektifnya pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Sekretariat DPRD		KaBag Umum dan Kepegawaian
		Masih kurangnya Dukungan alat kelengkapan DPRD terhadap pelaksanaan fungsi Pengawasan		KaBag Alat Kelengkapan DPRD
34	Administrasi Pemerintahan		SEKRETARIAT DAERAH 1 - ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
		Masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	ASDA 1	
		Masih tingginya angka kemiskinan		
		Masih rendahnya kinerja Pelayanan Pemerintahan	KA.BIRO PEMERINTAHAN	KaBag Kerjasama
		Masih kurangnya dokumen kebijakan kerjasama		
		Belum tepatnya kegiatan ketatausahaan biro pemerintahan		
		Belum tepatnya laporan Akuntabilitas Kegiatan		KaBag Administrasi Kewilayahan
		Belum optimalnya dokumen kebijakan Administrasi kewilayahan		
		Masih kurangnya dokumen Administrasi Pemerintahan dan otonomi daerah yang di tangani		KaBag Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah

NO	URUSAN	PERMASALAHAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	
		Masih kurangnya kinerja Pelayanan hukum yang ditangani	KA.BIRO HUKUM	
		Belum lengkapnya dokumen Peraturan Perundang-Undangan Daerah		KaBag Perundang-Undangan
		Belum optimalnya Dokumen Bantuan Hukum dan HAM		KaBag Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia
		Kurangnya produk hukum yang terdokumentasikan		KaBag Sosialisasi Dan Dokumentasi Produk Hukum
		Masih kurangnya ketatausahaan biro hukum		
		Masih kurangnya pelayanan Kesejahteraan Rakyat	KA.BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
		Masih kurangnya dokumen Rumusan Kebijakan dan Evaluasi bidang kesehatan, Dukcapil, pengendalian penduduk, KB, Pendidikan dan Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga		KaBag Kesehatan, Kependudukan dan Capil, Pengendalian Penduduk dan KB, Pendidikan, kebudayaan, Kepemudaan Dan Olah Raga
		Masih kurangnya dokumen Kebijakan dan Evaluasi Bidang Sosial dan Agama		KaBag Sosial dan Agama
		Masih kurangnya Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Kehidupan Beragama		Kasubag Perumusan Kebijakan Kehidupan Agama
		Masih kurangnya pembinaan terhadap kelembagaan kelompok/badan/lembaga/ organisasi keagamaan		Kasubag Perumusan Kebijakan Lembaga Agama
		Masih kurangnya pembinaan terhadap Kebijakan Masalah Sosial		Kasubag Perumusan Kebijakan Sosial
		Belum optimalnya pembinaan terhadap kebijakan Penguatan Lembaga Sosial		
		Masih kurangnya Dokumen Rumusan Kebijakan dan Evaluasi Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, PMD, Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat		KaBag Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, PMD, Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
		Belum tepatnya laporan Akuntabilitas Kegiatan		

NO	URUSAN		PERMASALAHAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB			
			Masih kurangnya pembinaan Kebijakan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak		Kasubag Perumusan Kebijakan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
			Masih kurangnya pembinaan Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
			Masih kurangnya pembinaan terhadap Kebijakan pelayanan kesehatan				
			Belum maksimalnya pembinaan terhadap Kebijakan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Kasubag Perumusan Kebijakan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		
			Belum maksimalnya pembinaan terhadap Kebijakan Perlindungan Masyarakat				
			Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan kepegawaian biro kesejahteraan rakyat		Kasubag Tata Usaha Biro		
			Kurangnya fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan				
35	Administrasi Pembangunan		SEKRETARIAT DAERAH 2 - ASISTEN PEMBANGUNAN DAN PEREKONOMIAN				
		Masih rendahnya Laju Pertumbuhan Ekonomi		ASDA 2			
		Masih tingginya pengangguran terbuka					
			Masih kurangnya implementasi kebijakan perekonomian daerah			KA.BIRO BINA PEREKONOMIA N	
			Minimnya dokumen kebijakan Sarana Perekonomian				KaBag Sarana Perekonomian
			Belum tepatnya laporan Akuntabilitas Kegiatan				
			Kurangnya dokumen Kebijakan Industri Jasa dan Ketenagakerjaan				KaBag Industri Jasa dan Ketenagakerjaan
			Kurangnya dokumen Kebijakan Produksi Daerah				KaBag Produksi Daerah
			Kurangnya Kinerja Administrasi Pembangunan			KA.BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNA N DAERAH	
			Kurangnya dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan administrasi Pembangunan				KaBag Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan dan Analisa Data
			Belum tepatnya laporan Akuntabilitas Kegiatan				
			Kurangnya Kinerja Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan				KaBag Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan

NO	URUSAN	PERMASALAHAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	
		Belum baiknya Kinerja Pengadaan Barang/Jasa		KaBag Administrasi Pelaksanaan Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa
		Masih kurangnya implementasi kebijakan daerah bidang Infrastrukutr dan SDA	KA.BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM	
		Belum maksimalnya dokumen kebijakan Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat, Permukiman		KaBag Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Kurangnya dokumen kebijakan Infrastruktur ESDM		KaBag Bina Infrastruktur ESDM
		Belum tepatnya laporan Akuntabilitas Kegiatan		
		Kurang berkembangnya dokumen rumusan kebijakan Perhubungan Kominfo dan sandi		KaBag Perhubungan, Komunikasi dan Informasi dan Persandian
36	Administrasi Umum		SEKRETARIAT DAERAH 3 - ASISTEN ADMINISTRASI	
		Belum baiknya Laporan akuntabilitas kinerja institusi pemerintahan (LAKIP)	ASDA 3	
		Masih kurangnya penerapan E-GOVERNMENT		
		Belum efektifnya layanan Pimpinan daerah	KA.BIRO ADMINISTRASI RUMAH TANGGA PIMPINAN	
		Masih kurangnya kinerja Pelayanan Tata Usaha Pimpinan		KaBag Tata Usaha Pimpinan
		Belum optimalnya kinerja layanan Keprotokolan		KaBag Protokol
		Belum maksimalnya kinerja layanan Rumah Tangga Pimpinan		KaBag Rumah Tangga
		Belum tepatnya laporan Akuntabilitas Kegiatan		
		Masih minimnya ketersediaan sarana prasarana dalam pelayanan Setda	KA.BIRO UMUM	
		Belum tepatnya kinerja Keuangan Sekretariat Daerah		
		Masih kurangnya Prasarana dan sarana penunjang kinerja di Lingkungan Setda		KaBag Perlengkapan
		Belum tepatnya laporan keuangan Sekretariat Daerah		KaBag Keuangan Setda

NO	URUSAN	PERMASALAHAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	
		Kurangnya laporan Akuntabilitas Kegiatan		KaBag Tata Usaha
		Belum tepatnya dokumen akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	KA.BIRO ORGANISASI	
		Kurangnya ketersediaan Dokumen Bidang Kelembagaan Perangkat Daerah		KaBag Kelembagaan
		Kurangnya Dokumen Ketatalaksanaan Perangkat Daerah		KaBag Ketata laksanaan dan Pelayanan Publik
		Belum lengkapnya Data pembangunan Daerah		
		Kurangnya laporan Akuntabilitas Kegiatan		
		Belum tepatnya Dokumen Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah		KaBag Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah
37	Komunikasi		BADAN PENGHUBUNG DAERAH	
		Kurangnya koordinasi Badan Penghubung terhadap K/L	KABAN	
		Lemahnya koordinasi badan penghubung terhadap kedutaan besar		
		Belum optimalnya koordinasi badan penghubung terhadap Badan Penghubung Provinsi lain		
		Belum efektifnya kepuasan pelayanan badan penghubung terhadap masyarakat		
		Belum baiknya Pengelolaan Wisma		Ka.Si Fasilitasi Penyelenggara Pemerintah Daerah
		Masih kurangnya Fasilitasi Pejabat Pemda dan Tamu		
		Belum optimalnya Pembinaan masyarakat daerah		Ka.Si Fasilitasi Pelayanan Masyarakat
		Kurangnya Fasilitasi kehumasan mahasiswa		
		Belum efektifnya Sistem layanan Informasi Promosi		Ka.Si Promosi, Investasi dan Hubungan Kelembagaan
		Belum maksimalnya Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah		
		Masih kurangnya Promosi Produk dan Potensi Unggulan Daerah		

4.2 ISU STRATEGIS DAERAH DALAM RPJPD PROVINSI BANTEN 2005-2025

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten 2017-2022 isu strategis dan permasalahan pokok yang dikembangkan merujuk pada Rencana Pembangunan jangka panjang Daerah Provinsi Banten tahun 2005-2025 dengan penyajian sebagai berikut :

4.2.1 Isu Ketahanan Pangan, Kemiskinan, Kualitas SDM dan Kesejahteraan Sosial

Dengan mencermati berbagai fenomena dan kecenderungan yang terjadi dalam beberapa tahun sebelumnya, khususnya yang terkait masalah ketahanan pangan, kemiskinan, kualitas SDM, dan kesejahteraan sosial dapat diindikasikan beberapa isu pembangunan dengan permasalahan pokok yang meliputi:

- a. Masih tingginya tingkat kemiskinan, dimana 8,5 persen penduduk (816.742) masih tergolong dalam kategori miskin hingga tahun 2008, dengan sebaran di wilayah perkotaan sekitar 45,0 persen dan wilayah perdesaan 55,0 persen.
- b. Masih terdapatnya kantung-kantung rawan gizi buruk, terutama disebabkan karena tidak memadainya pelayanan kesehatan.
- c. Masih belum memadainya tingkat pendidikan masyarakat, dimana dari tahun 2006 hingga tahun 2008 dengan angka rata-rata lama sekolah adalah 8,1 tahun (standar nilai maksimum 15 tahun, UNDP). dan angka melek huruf masih sebesar 95,6 persen (standar nilai maksimum 100 persen, UNDP)
- d. Masih belum memadainya tingkat kesehatan masyarakat, dimana angka harapan hidup baru mencapai 66,0 tahun hingga tahun 2008 (standar nilai maksimum 85 tahun, UNDP).
- e. Masih tingginya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) pada tahun 2008, yang terdiri dari 91.438 jiwa PMKS.
- f. Suku Baduy sebagai komunitas adat terpencil (KAT) yang memerlukan perlindungan dan perlakuan khusus atas keberadaan dan keberlanjutan komunitasnya.
- g. Sebanyak 764 desa atau 51,52 persen terhadap jumlah desa/kelurahan di Provinsi Banten tergolong dalam desa tertinggal, yang terdiri dari 458 desa tertinggal di daerah tertinggal dan 306 desa tertinggal di daerah non tertinggal.
- h. Kualitas SDM dan peran perempuan masih menunjukkan ketertinggalan dibandingkan dengan kualitas SDM dan peran laki-laki dalam pembangunan. Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2008 sebesar 62,0 (di bawah IPG Nasional 65,3), dan menempatkan Banten pada peringkat 28 dari 33 provinsi.
- i. Degradasi nilai-nilai moral dan budaya semakin bertumbuhkembang seiring dengan derasnya pengaruh globalisasi.
- j. Masih tingginya pertumbuhan penduduk, dimana hingga tahun 2008 jumlah penduduk Provinsi Banten mencapai 9.602.445 jiwa. Dalam kurun waktu 2007-2008 jumlah penduduk bertambah

sebanyak 178.939 jiwa atau meningkat sebesar 2,15 persen. Kepadatan penduduk Provinsi Banten adalah 1.065 jiwa/km².

4.2.2 Pengembangan Ekonomi Masyarakat Berorientasi Pasar Global dengan permasalahan pokok yang meliputi:

- a. Hingga tahun 2008, sekitar $\pm 88,0$ persen perekonomian Provinsi Banten dihasilkan oleh aktifitas ekonomi di wilayah utara (Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kota Serang, dan Kota Tangerang Selatan) yang bertumpu pada sektor sekunder dan tersier, sedangkan $\pm 12,0$ persen sisanya dihasilkan oleh aktifitas ekonomi di wilayah selatan (Kabupaten Pandeglang dan Lebak) yang bertumpu pada sektor primer.
- b. Ketidakmerataan kondisi perekonomian wilayah, dimana nilai ekonomi kabupaten/kota pada tahun 2008, dapat diklasifikasikan dalam '*daerah sangat berkembang*' (Kabupaten Tangerang (termasuk Kota Tangsel), dan Kota Tangerang) dengan pencapaian PDRB *a.d.h.* berlaku Rp.35,12–44,69 trilyun), '*daerah berkembang*' (Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon dengan pencapaian PDRB *a.d.h.* berlaku Rp.10,73–18,01 trilyun) serta '*daerah sedang berkembang*' (Kota Serang, Kab. Lebak, dan Kab. Pandeglang) dengan pencapaian PDRB *a.d.h.* berlaku Rp.4,36–6,94 trilyun).
- c. Ketidakseimbangan minat tujuan investasi, dimana sampai dengan tahun 2008 sekitar 97,40 persen nilai proyek investasi PMA dan 86,41 persen nilai proyek investasi PMDN berlokasi di wilayah Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.
- d. Orientasi investasi belum bertumpu pada sumberdaya lokal, dimana sektor usaha yang diminati melalui investasi masih terkonsentrasi pada sektor usaha perdagangan dan reparasi, industri logam dasar, barang dari logam, mesin dan elektronika, industri karet, barang dari karet dan plastik, industri kimia dasar, barang kimia, dan farmasi, dan industri tekstil.
- e. Belum optimalnya nilai tambah sektor tersier dan sektor primer, dimana tercermin dari kontribusi ekonomi sektor tersier yang masih sebesar 38,95 persen dan sektor primer sebesar 8,5 persen.
- f. Belum optimalnya peran sektor dalam penyerapan tenaga kerja, dimana sektor sekunder dengan kontribusi ekonomi 52,56 persen hanya menyerap tenaga kerja 19,24 persen, sektor tersier dengan kontribusi ekonomi 38,95 persen menyerap tenaga kerja 41,12 persen, sedangkan sektor primer yang kontribusi

ekonominya hanya sebesar 8,5 persen mampu menyerap tenaga kerja 22,16 persen.

- g. Masih tingginya pengangguran dan rendahnya kualitas SDM tenaga kerja lokal, dimana hingga tahun 2008 tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten masih sebesar 6,8 persen, dan komposisi penduduk usia 10 tahun keatas menurut pendidikan masih menunjukkan proporsi 93,7 persen berpendidikan non sarjana (tamat SLTA hingga tidak sekolah).
- h. Masih rendahnya daya beli masyarakat dan tingginya ketimpangan pendapatan masyarakat, dimana hingga tahun 2008 indeks daya beli masyarakat baru mencapai 56,4 (standar nilai maksimum 100, UNDP). Sedangkan angka gini ratio pada tahun 2008 masih sebesar 0,30.

4.2.3 Pengembangan Pelayanan Kepelabuhanan Skala Nasional dan Internasional serta Peningkatan Prasarana dan Sarana Wilayah, dengan permasalahan pokok yang meliputi:

- a. Perlunya mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan bandar dan pelabuhan yang terdapat di Provinsi Banten (Pelabuhan Ciwandan, Pelabuhan Merak, Bandara Soetta, Pelabuhan Perikanan, dll), sebagai gerbang inlet dan outlet distribusi barang (ekspor-impor) dan penumpang, baik dalam lingkup nasional dan internasional.
- b. Koordinasi dan kerjasama yang belum terpadu dan solid dalam upaya pengembangan Pelabuhan Internasional Bojonegara dan Pengembangan KEK Bojonegara, baik antar instansi pemerintah secara vertikal atau horisontal, maupun antara pemerintah dengan pihak swasta (investor).
- c. Ketidakmerataan ketersediaan prasarana dan sarana transportasi yang menghambat upaya percepatan pemerataan pembangunan, dimana tingkat ketersediaan jaringan jalan negara dan provinsi di wilayah utara ($0,33 \text{ km/km}^2$) lebih memadai daripada di wilayah selatan ($0,26 \text{ km/km}^2$).
- d. Pengelolaan sistem jaringan transportasi (antar moda, antar wilayah dan antar lembaga) masih belum terpadu, dimana pelayanan sarana angkutan umum umumnya lebih terkonsentrasi pada wilayah-wilayah perkotaan, jaringan kereta api belum menyentuh langsung pada bangkitan perjalanan (seperti kawasan industri, bandar udara, serta jalur padat yang melayani angkutan komuter) disertai dengan frekuensi layanan yang masih terbatas, kesimpangsiuran penanganan kewenangan kepelabuhanan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, rendahnya disiplin masyarakat pengguna jalan,

profesionalitas aparat dan operator transportasi, hingga meningkatnya kemacetan dan kecelakaan dalam penyelenggaraan transportasi.

- e. Masih rendahnya pelayanan jaringan irigasi lintas kabupaten/kota dalam mendukung kegiatan pertanian, dimana jaringan irigasi lintas kabupaten/kota yang menjadi kewenangan pengelolaan provinsi, hingga tahun 2008 sekitar 20,68 persen rusak berat (tidak dapat beroperasi), 18,41 persen rusak ringan, dan 60,91 persen dalam kondisi baik.
- f. Kondisi rasio elektrifikasi diluar Tangerang hingga tahun 2008 adalah 72,6 persen, namun demikian rasio elektrifikasi Banten relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan rasio elektrifikasi Nasional sebesar 64,3 persen, serta rasio elektrifikasi Jawa Barat sebesar 61,5 persen.
- g. Masih terbatasnya pelayanan air bersih bagi rumah tangga, dimana pelayanan air bersih melalui perpipaan baru menjangkau kawasan perkotaan dengan kapasitas 176.890 sambungan, atau sekitar 7,72 persen rumah tangga hingga tahun 2008.
- h. Masih belum memadainya penyediaan rumah dan kualitas perumahan, dimana baru 85,79 persen rumah tangga yang memiliki tempat tinggal dengan status milik sendiri. Sebanyak 37,23 persen rumah tangga menghuni tempat tinggal dengan luas lantai < 50 m². Masih terdapat 29,00 persen rumah tangga yang belum mendapatkan pelayanan air bersih. Rumah tangga tanpa akses terhadap sanitasi menggunakan jamban sendiri sebesar 30,20 persen. Sementara itu, terdapat 244,31 ha kawasan kumuh yang belum ditangani di kabupaten/kota di Provinsi Banten.

4.2.4 Penataan Ruang, Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan Hidup, dengan permasalahan pokok yang meliputi:

- a. Belum optimalnya kelembagaan dan implementasi penataan ruang, dimana koordinasi penataan ruang belum berjalan secara maksimal antara provinsi dengan kabupaten/kota maupun dengan wilayah perbatasan belum berjalan baik, belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya.
- b. Belum memadainya operasionalisasi atas penetapan fungsi-fungsi kawasan dalam rencana tata ruang wilayah Provinsi Banten, yang meliputi kawasan strategis, kawasan cepat tumbuh, kawasan tertinggal, kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, dan kawasan perbatasan. Termasuk belum

memadainya kesiapan provinsi dalam mendukung Kawasan strategis Provinsi

- c. Belum optimalnya Rasio realisasi pemanfaatan dalam rencana pola ruang pada luas kawasan budidaya dan luas kawasan lindung secara akumulatif dari kondisi eksisting adalah sebesar 80,7 persen budidaya dan 19,3 persen lindung. Hal ini ditandai dengan beberapa peruntukan lahan yang terkonversi, sehingga untuk mencapai target 30 persen kawasan lindung tahun 2030 diperlukan pengendalian pemanfaatan ruang.
- d. Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya air, dimana kerusakan sungai terjadi pada 3 Wilayah Sungai (WS Ciujung-Ciliman, WS Cisadea-Cikuningan dan WS Cisadane-Ciliwung), sungai lintas kabupaten/kota dalam kondisi rusak sebesar 19,54 persen, pemanfaatan air bawah tanah secara ilegal, dan sebagian besar situ tidak dilengkapi dengan bangun-bangunan irigasi.
- e. Belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam, dimana beberapa potensi sumberdaya mineral hingga saat ini belum diusahakan seperti tras, batu apung, besi dan andesit. Sumber daya energi alternatif yang berpotensi untuk dikembangkan seperti: sumberdaya energi fosil (batubara), energi panas bumi, tenaga air skala kecil, biomassa, tenaga surya, tenaga angin, dan energi gelombang laut. Potensi sumberdaya perikanan tangkap baru memanfaatkan 82,09 persen dari potensi lestarnya (wilayah perairan Kabupaten Pandeglang). Potensi sumberdaya perikanan budidaya, meliputi budidaya laut (KJA dan rumput laut) di pantai utara dan pantai barat, serta potensi lahan tambak baru dimanfaatkan sekitar 78,8 persen. Hingga saat ini telah diidentifikasi 60 obyek wisata kategori alam, dan sebagian besar belum dikembangkan.
- f. Belum optimalnya penanganan dan pengelolaan limbah berbau, beracun dan berbahaya.
- g. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan serta rendahnya penegakan hukum lingkungan.
- h. Semakin meningkatnya ancaman bencana alam.

4.2.5 Pemerintahan yang Baik dan Bersih, dengan permasalahan pokok yang meliputi:

- a. Belum optimalnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan Perangkat Daerah.
- b. Belum memadainya dukungan prasarana dan sarana pemerintahan daerah.
- c. Belum memadainya kualitas SDM dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah.

- d. Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah.
- e. Belum memadainya penerapan perencanaan pembangunan partisipatif.
- f. Pembentukan daerah otonom baru dalam rangka peningkatan pelayanan publik.
- g. Perlunya pemeliharaan kondisi ketenteraman dan ketertiban umum
- h. Belum optimalnya ketersediaan produk hukum daerah dan penegakan supremasi hukum.
- i. Dukungan terhadap penyelenggaraan pemilu, pemilu presiden, dan PILKADA.

Berdasarkan hasil analisa dan kajian terhadap kondisi dan tantangan pembangunan yang dihadapi Provinsi Banten di masa mendatang, maka sebagai arahan dan acuan dalam pelaksanaan pembangunan ditetapkan target-target makro pembangunan Provinsi Banten hingga tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 4.2
Estimasi Indikator Makro Pembangunan Provinsi Banten
Tahun 2012-2025

NO	INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN	SATUAN	TAHUN 2008	ESTIMASI TAHUN PERENCANAAN			
				2012	2017	2022	2025
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	persen	5,82	6,5 – 6,8	6,8 – 7,0	7,0 – 7,4	7,4 – 7,8
2.	PDRB a.d.h. Berlaku	Rp. Trilyun	122,497	180,68	282,96	430,13	548,88
3.	PDRB a.d.h. Konstan	Rp. Trilyun	68,83	87,75	119,95	166,24	203,60
4.	PDRB Per Kapita	Rp. Juta	12,76	17,14	24,52	34,12	45,06
5.	Jumlah Penduduk	Jiwa	9.602.445	10.501.425	11.526.493	12.626.715	13.164,799
6.	Laju Pertumbuhan Penduduk	persen	2,15	2,00	1,86	1,71	1,62
7.	Persentase Pengangguran Terbuka	persen	6,8	5,6 – 5,2	5,2 – 4,8	4,8 – 4,4	4,4 – 4,0
8.	Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa	816.742	650.000 – 600.000	600.000 – 550.000	550.000 – 500.000	500.000 – 450.000
9.	Persentase Rumah Tangga Miskin (RTM)	persen	33,04	25,0 – 23,0	20,0 – 15,0	15,0 – 10,0	10,0 – 5,0
10.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	-	69,7	72,88	75,48	78,08	80,08

Asumsi :

- Terjaganya stabilitas moneter;
- Kondisi keamanan, sosial dan politik yang kondusif;
- Tidak terjadi bencana dengan skala yang besar;
- Inflasi YOY berada dibawah 7,5 persen;
- Adanya komitmen bersama seluruh stakeholders.

Sumber : Hasil Analisis, 2008

Dengan mempertimbangkan target angka dan nilai estimasi dari beberapa indikator makro pembangunan tersebut, maka dalam dua puluh tahun mendatang dapat diperkirakan beberapa kondisi yang akan dihadapi oleh Provinsi Banten sebagai berikut:

Tabel 4.3
Estimasi Kondisi Makro Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2012-2025

NO	KOMPONEN	ASUMSI/ STANDAR	SATUAN	ESTIMASI TAHUN PERENCANAAN			
				2012	2017	2022	2025
1.	Kebutuhan Pangan	120 Kg/Jiwa/Th	Ton	1.260.171	1.383.179	1.515.206	1.579.776
2.	Kebutuhan Perumahan	1 Unit/KK	Unit	2.100.285	2.305.298	2.525.343	2.632.960
3.	Kebutuhan Air Bersih	120 Lit/Jiwa/Hari	Liter	1.260.171.013	1.383.179.181	1.515.205.910	1.579.775.997
4.	Kebutuhan Listrik	0,15 KVA/Jiwa	KVA	1.575.214	1.728.974	1.894.008	1.974.720
5.	Timbulan/Pro-duksi Limbah	2,5 Lit/Jiwa/Hari	Liter	26.253.563	28.816.233	31.566.790	32.912.000

Sumber : Hasil Analisis, 2008

4.3 ISU STRATEGIS DAERAH RPJMD PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022

Isu strategis merupakan kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya sangat signifikan bagi entitas daerah/ masyarakat dimasa mendatang, yang meliputi permasalahan yang berlarut sudah sampai pada titik tertentu, menimbulkan dampak amat luas, yang menyangkut permasalahan kewenangan dan terkadang tidak mudah dijelaskan tetapi dirasakan kehadirannya.

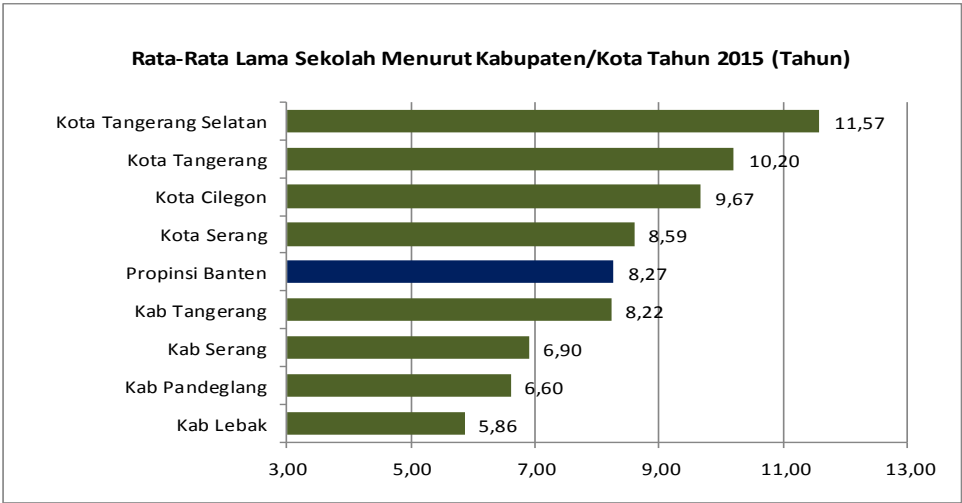
Hasil kajian menunjukkan isu strategis di provinsi Banten di kelompokkan dalam empat isu strategis dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1. Isu strategis kesenjangan wilayah
- 2. Isu strategis daya saing daerah (Sumber daya alam dan sumber daya manusia)
- 3. Isu strategis Kemiskinan dan pengangguran
- 4. Isu strategis Tata kelola pemerintahan

Untuk memberikan gambaran terhadap isu strategi disampaikan penjelasannya dengan data pendukung sebagai berikut.

4.3.1 Isu strategis kesenjangan wilayah

- Ketimpangan Aksesibilitas Pendidikan



Sumber: SIPD Propinsi Banten

Gambar 4.1
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)
menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015

Pada grafik tergambarkan rata-rata lama sekolah di wilayah kabupaten masih dibawah rata-rata lama sekolah di wilayah perkotaan, terutama di Kab. Lebak dan Pandeglang.

- Ketimpangan Aksesibilitas Kesehatan
Ketersediaan rumah sakit dibandingkan dengan jumlah penduduk jumlahnya sangat kecil pada kabupaten Tangerang dan Serang dibandingkan rata-rata ketersediaan rumah sakit di propinsi Banten. Khususnya di Kab Tangerang kebutuhan puskesmas tiap 100.000 penduduk masih perlu ditingkatkan.

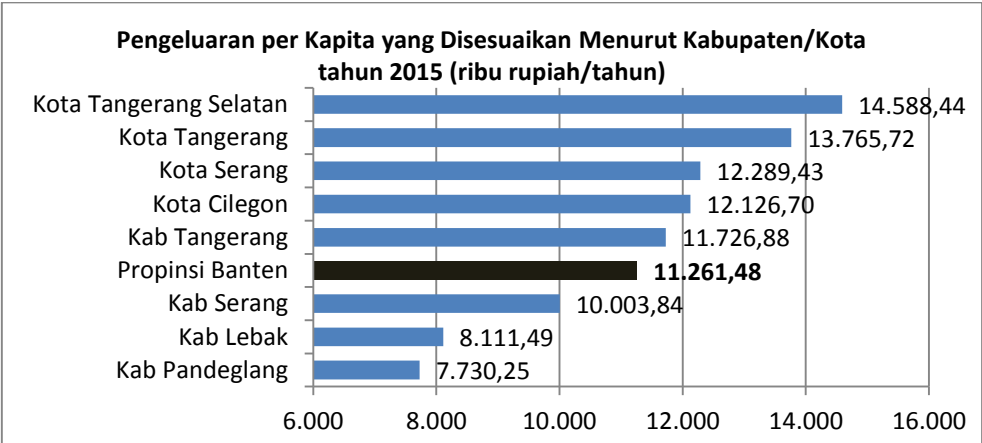
Tabel 4.4
Fasilitas Kesehatan Propinsi Banten Tahun 2015

Kabupaten/ Kota	Rumah Sakit	Puskes-mas	Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk dengan Jumlah Rumah Sakit	Rasio Puskesmas Berdasarkan per 100.000 Penduduk
Kabupaten					
Pandeglang	2	36	1.194.911	597.456	3,01
Lebak	18	42	1.269.812	70.545	3,31
Tangerang	3	43	3.370.594	1.123.531	1,28
Serang	1	31	1.474.301	1.474.301	2,10
Kota					
Tangerang	20	32	2.047.105	102.355	1,56
Cilegon	5	8	412.106	82.421	1,94

Serang	6	16	643.205	107.201	2,49
Tangerang Selatan	23	25	1.543.209	67.096	1,62
Propinsi Banten	78	233	11.955.243	153.272	1,95

Sumber: SIPD Propinsi Banten

- Ketimpangan Daya Beli Masyarakat



Sumber: SIPD Propinsi Banten

Gambar 4.2
 Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan
 Menurut Kabupaten/Kota (Ribu Rupiah/Tahun) Tahun 2015

Pengeluaran per kapita Kab. Lebak dan Kab Pendeglang besarannya masih tertinggal terhadap Pengeluaran per kapita Propinsi Banten. Sementara di wilayah perkotaan pengeluaran per kapita sudah cukup tinggi.

- Kurangnya Infrastruktur Ekonomi Masyarakat (Sesuai Potensi Ekonomi Wilayah)

Hubungan kebutuhan infrastruktur pada masyarakat bisa di ukur dengan rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk. Sementara rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk diperoleh dengan membagi jumlah penduduk (ribu jiwa) suatu wilayah dengan panjang jalan (km). Rasio ini memiliki arti 1 km jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah ribu jiwa penduduk.

Tabel 4.5
 Rasio Panjang Jalan dengan jumlah Penduduk (ribu jiwa/km) Tahun 2015

No	Kabupaten/Kota	Panjang Jalan (km)	Jumlah Penduduk	Rasio Panjang Jalan dengan jumlah Penduduk (ribu jiwa/km)
1	Kab. Pandeglang	283,34	1.194.911,00	4,22
2	Kab. Lebak	404,72	1.269.812,00	3,14
3	Kab. Tangerang	123,3	3.370.594,00	27,34
4	Kab. Serang	299,23	1.474.301,00	4,93
5	Kota Tangerang	36,77	2.047.105,00	55,67
6	Kota Cilegon	26,89	412.106,00	15,33

No	Kabupaten/Kota	Panjang	Jumlah	Rasio Panjang Jalan
7	Kota Serang	142,37	643.205,00	4,52
8	Kota Tangerang Selatan	57,76	1.543.209,00	26,72
Jumlah		1.329,38	11.955.243,00	8,99

Sumber: SIPD Propinsi Banten

Di Kota Tangerang, Kab Tangerang dan Kota Tangerang Selatan jumlah penduduk yang per kilometer panjang jalan cukup tinggi, sehingga menimbulkan kepadatan dijalan. Di wilayah ini perlu ditingkatkan layanan panjang jalan untuk bisa menopang potensi ekomoni wilayah yang memadai.

- Ketimpangan Kemandirian Fiskal Antar Daerah dan Wilayah
- Kurangnya Konektivitas Infrastruktur Kewilayahan dan Antar Wilayah

Rasio panjang jalan terhadap luas wilayah masih dibawah 20 persen pada semua kabupaten di Propinsi Banten

Tabel 4.6
Rasio Panjang Jalan terhadap Luas Wilayah Tahun 2015

No	Kabupaten/Kota	Panjang Jalan (km)	Luas Wilayah (km2)	Rasio Panjang Jalan dengan Luas wilayah
Kabupaten				
1	Pandeglang	283,34	2.746,89	10 persen
2	Lebak	404,72	3.426,56	12 persen
3	Tangerang	123,3	1.011,86	12 persen
4	Serang	299,23	1.734,28	17 persen
Kota				
1	Tangerang	36,77	153,93	24 persen
2	Cilegon	26,89	175,50	15 persen
3	Serang	142,37	266,71	53 persen
4	TangerangSelatan	57,76	147,19	39 persen
Jumlah		1329,38	9.662,92	14 persen

Sumber: SIPD Propinsi Banten

Pada Isu strategis kesenjangan wilayah keterkaitanya dengan misi RPJMN 2015-2019 pada misi 1. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera, keterkaitannya dengan NAWACITA ke 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan

4.3.2 Isu strategis daya saing daerah (Sumber daya alam dan sumber daya manusia)

- Ketimpangan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Akibat Lemahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Tabel 4.7
Kualitas penduduk (Rasio Lulusan S1/S2/S3) Tahun 2010-2014

No	Kabupaten/Kota	2012	2013	2014
1	Kab. Pandeglang	2,48	2,67	2,49
2	Kab. Lebak	1,25	1,67	1,77
3	Kab. Tangerang	3,18	3,21	4,65
4	Kab. Serang	2,59	1,42	2,11
1	Kota Tangerang	8,11	6,43	9,47
2	Kota Cilegon	5,95	3,95	4,88
3	Kota Serang	6,05	4,43	4,36
4	Kota Tangerang Selatan	15,34	14,29	16,55
Jumlah		5,39	5,21	6,27

Sumber: SIPD Propinsi Banten

- Ketimpangan Investasi Antar Wilayah

Tabel 4.8
Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2015

Kabupaten/Kota	Realisasi Investasi		
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Ribu USD)	Penyerapan Tenaga Kerja
Kabupaten			
Pandeglang	6	373	93
Lebak	26	393 266	886
Tangerang	822	506 607	24 476
Serang	293	614 803	14 020
Kota			
Tangerang	372	153 264	14 938
Cilegon	207	733 395	7 348
Serang	18	34 047	580
Tangerang Selatan	140	104 188	2 612
Total	1884	2 541 969	64 953

Sumber: SIPD Propinsi Banten

Tabel 4.9
Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2015

Kabupaten/Kota	Realisasi Investasi		
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi	Penyerapan Tenaga Kerja
Kabupaten/Kota			
Pandeglang	9	187 387,00	1 145
Lebak	24	137 633,50	663
Tangerang	143	2 064 478,00	16 551

Serang	90	3 286 554,90	4 846
Kota			
Tangerang	81	529 327,30	2 427
Cilegon	42	4 508 505,80	9 073
Serang	18	1 009,90	114
Tangerang Selatan	20	0.00	260
Total	427	10 709 896,40	35 079

Sumber: SIPD Propinsi Banten

- Kurangnya Daya Dukung Infrastruktur dalam Meningkatkan Investasi

Tabel 4.10
 Panjang Jalan Menurut Kabupaten/Kota dan Kondisi Jalan
 di Provinsi Banten (km) Tahun 2015

No	Kabupaten/Kota	Kondisi Jalan			
		Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat
Kabupaten					
1	Pandeglang	131,19	23,9	3,49	17,25
2	Lebak	57,18	35,25	25,85	67,64
3	Tangerang	47,00	21,93	7,82	37,75
4	Serang	93,19	74,56	0,00	73,87
Kota					
1	Tangerang	9,00	8,90	11,20	-
2	Cilegon	2,82	0,50	-	0,10
3	Serang	29,07	18,19	-	6,50
4	TangerangSelatan	15,35	11,10	11,95	10,36
Jumlah		384,79	194,32	60,31	213,47

Sumber: SIPD Propinsi Banten

Pada isu strategis Kesenjangan Daya Saing (Sumber daya alam dan Sumber daya Manusia), keterkaitanya dengan RPJMN 2015-2019 pada misi 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing ,misi ke 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan, dan keterkaitannya dengan NAWACITA ke 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia, ke 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, Ke 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

4.3.3 Kemiskinan dan pengangguran

Kemiskinan di Provinsi Banten sangat dipengaruhi oleh migrasi yang masuk ke Provinsi Banten khususnya di wilayah Tangerang Raya, hal lain juga mempengaruhi adalah masih tingginya Desa Tertinggal di Kabupaten Lebak, Pandeglang dan Serang.

Tabel 4.11
Migrasi Masuk Risen, Migrasi Keluar Risen, dan Migrasi Neto Risen
menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015

NO	KABUPATEN/KOTA	Migrasi Masuk	Migrasi Keluar	Migrasi Neto
1	Kab. Pandeglang	7.744	41.280	-33.536
2	Kab. Lebak	15.723	29.035	-13.312
3	Kab. Tangerang	125.285	85.161	40.124
4	Kab. Serang	33.661	47.042	-13.381
5	Kota Tangerang	155.790	71.578	84.212
6	Kota Cilegon	14.927	12.759	2.168
7	Kota Serang	24.555	12.859	11.696
8	Kota Tangerang Selatan	66.668	27.552	39.116

Sumber : SIPD Provinsi Banten

Migrasi masuk tertinggi terjadi di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, hal ini mengakibatkan masih tingginya tingkat pengangguran. Sedangkan migrasi keluar tertinggi dari Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang dan Lebak, hal ini menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat pengangguran di daerah tersebut.

Tabel 4.12
Indeks Desa Membangun Provinsi Banten Tahun 2015

STATUS DESA	JUMLAH	%
Mandiri	4	0,32
Maju	43	4,28
Berkembang	396	32,0
Tertinggal	674	54,5
Sangat Tertinggal	110	8,9

Desa tertinggal tertinggi terdapat di Kabupaten Lebak, Pandeglang dan Serang. Desa sangat tertinggal mencapai 110 desa (8,9%) dari total 1.238 desa di Provinsi Banten. Diperlukan kebijakan afirmatif untuk penyelesaian desa sangat tertinggal dan penyusunan strategi daerah percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Pada isu Kemiskinan dan pengangguran, keterkaitanya dengan RPJMN 2015-2019 pada misi 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera , misi ke 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan, dan keterkaitannya dengan NAWACITA Ke 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatua, ke 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia, ke 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional,

Ke 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan,
 Ke 8. Melakukan revolusi karakter bangsa.

4.3.4 Tata kelola pemerintahan

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Banten memperoleh nilai 51,12 atau predikat CC pada tahun 2015. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Provinsi Banten sudah menunjukkan hasil yang cukup memadai dan masih memerlukan banyak perbaikan. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 4.13
 Rincian penilaian LAKIP Tahun 2015

NO	KOMPONEN YANG DINIAI	2014		2015	
		Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	35	21,49	30	15,72
2	Pengukuran Kinerja	20	11,48	25	9,86
3	Pelaporan Kinerja	15	8,48	15	9,38
4	Evaluasi Internal	10	7,02	10	7,28
5	Capaian Kinerja	20	9,78	20	8,88
	Nilai Hasil Evaluasi	100	58,25	100	51,12
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		CC		CC

Pada isu Tata Kelola Pemerintahan, keterkaitanya dengan RPJMN 2015-2019 pada misi ke 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum, misi 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera, misi ke 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan, dan keterkaitannya dengan NAWACITA Ke 2. Membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, Ke 8. Melakukan revolusi karakter bangsa.

4.4. ISU STRATEGIS DAERAH PROVINSI TERDEKAT

4.4.1 Isu Jawa Barat

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun isu strategis pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat, yaitu:

- a. Pertumbuhan penduduk dan persebarannya.
- b. Kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan.
- c. Pengangguran dan ketenagakerjaan.
- d. Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
- e. Kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar dan strategis
- f. Kualitas lingkungan hidup untuk mendukung terwujudnya *Jabar Green Province*.
- g. Kualitas demokrasi
- h. Kecepatan dan ketepatan penanganan bencana serta adaptasi masyarakat
- i. terhadap bencana
- j. Pemerintahan daerah yang efektif dan efisien.
- k. Pelestarian nilai – nilai dan warisan budaya lokal
- l. Pengembangan Industri Wisata Jawa Barat
- m. Penanggulangan penduduk miskin.
- n. Pasar global dan *Asean – China Free Trade Area (ACFTA)*
- o. Pencegahan dan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- p. RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2017 IV - 8
- q. Alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian dan penertiban okupasi lahan tidur (HGU)
- r. Ketahanan Pangan
- s. Keamanan dan ketertiban daerah

Isu Strategis Provinsi Jawa Barat terkait Provinsi Banten

Keterkaitan isu-isu strategis Provinsi Jawa Barat dengan isu-isu strategis Provinsi Banten ditata dalam beberapa bidang penekanan yaitu:

1. Geografi

- a. Luas wilayah jawa barat 35.377,76 Km² yang terdiri dari 18 Kabupaten dan 9 Kota data pada tahun 2014 panjang jalan di jawa barat 22.751,155 Km, dan moda transportasi yang tersedia kendaraan darat mobil dengan jumlah terminal 122, moda transportasi laut dengan 10 pelabuhan, terdapat kereta api dan bandara udara Husen Sastra Negara.
- b. Menganangkan sebagai *green province*, dan kecepatan dalam penanganan bencana serta alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian menjadi hal yang penting di Jawa Barat
- c. Hal yang perlu menjadi perhatian Provinsi Banten adalah bentuk kerjasama penataan infrastruktur di perbatasan yang dapat mensinergiskan beberapa moda transportasi bagi arus barang dan penumpang, *green province* bagi Jawa Barat juga menjadi dorongan bagi Provinsi Banten untuk menjadi bagian dari lingkungan yang sehat bagi kedua daerah. Secara Bersama mempertahankan fungsi lahan pertanian yang maju sebagai daerah lumbung padi secara bersama-sama.

2. Demografi

- a. Jumlah penduduk jawa barat 46,7 Juta jiwa dengan luas 35.377,76 Km², tingkat kepadatan penduduk 1000 jiwa km² dengan laju pertumbuhan penduduk 1,48 % pertahun, dengan tingkat pengangguran terbuka TPT 8,49 % dan penduduk miskin 8,77 % atau 4,17 Juta
- b. Pembangunan manusia di Jawa Barat pada tahun 2016 terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan terus meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Barat. Pada tahun 2016, IPM Jawa Barat telah mencapai 70,05. Angka ini meningkat sebesar 0,55 poin dibandingkan dengan IPM Jawa Barat pada tahun 2015 yang sebesar 69,50. Kontribusi berasal dari angka harapan hidup saat lahir 72,44 Tahun, Rata rata lama sekolah 7,95 dan pengeluaran perkapita 10.035.
- c. Wilayah perbatasan yang sangat dekat dengan isu kualitas sumber daya manusia yang hampir menyerupai namun dengan jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat yang lebih besar menjadi

perhatian terhadap potensi masing-masing daerah untuk menata kependudukan dan catatan sipilnya lebih berkualitas, kerjasama dalam mempertahankan kualitas pembangunan manusia dan menjaga pertumbuhan laju penduduk dengan proporsi yang wajar dan seimbang.

3. Pemerintahan

- a. Provinsi Jawa Barat dengan Jumlah penduduk 46,7 Juta dengan jumlah Pegawai negeri sipil 333.713, mengelola 27 Kabupaten/Kota , 626 kecamatan, 2.671 kelurahan, 3.291 desa perlu menjalankan roda pemerintahan dengan efektif dan efisien dengan senantiasa menjaga ketertiban umum. Sedangkan tingkat partisipasi masyarakat dalam demokrasi dari target di atas 70 persen realisasi 60 persen.
- b. Provinsi Banten dalam pengelolaan pemerintahan daerah perlu selalu menjaga konsistensi kualitas pelayanan pemerintahan, menjaga stabilitas keamanan ketertiban dan menjaga partisipasi masyarakat dalam demokrasi secara bersama-sama dengan Provinsi Jawa Barat.

4. Ekonomi

- a. Ekonomi Jawa Barat tahun 2016 tumbuh 5,67 persen meningkat dibanding tahun 2015 sebesar 5,04 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 14,27 persen. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (KRT) sebesar 5,60 persen. Tiga sektor kontribusi terbesar dalam PDRB atas dasar harga berlaku yaitu Industri Pengolahan 42,49 persen, Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 15,15 persen, dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 8.90 persen .
- b. Isu perekonomian ini di Jawabarat salah satu untuk dapat menanggulangi kemiskinan dengan memperkuat Basis Data terpadu oleh Tim Koodinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK).

- c. Provinsi Banten dengan potensi perekonomian yang telah dicapai dapat membangun kerangka ekonomi dengan orientasi pada pertumbuhan ekonomi yang memiliki dampak terjadinya penurunan angka kemiskinan. Perlu disimulasikan dan diformulasi agenda yang dapat dilakukan bersama dengan memberi hasil yang optimal.

5. Kerjasama

- a. Provinsi Jawa Barat dengan jumlah penduduk yang besar dan wilayah yang luas menjadi potensi besar bagi pertumbuhan daerah di sekitar perbatasan Provinsi Banten.
- b. Kerjasama yang dapat dilakukan dengan pengembangan infrastruktur perbatasan, moda transportasi untuk memperlancar arus barang dan penumpang. Potensi Parawisata pada masing-masing daerah dapat dikerjasamakan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Kerjasama bidang perdagangan industri, dan investasi dapat dikembangkan dengan optimal.

4.4.2 Provinsi DKI Jakarta

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, dan menentukan tujuan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, dilakukan melalui peningkatan kualitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata laksana dengan mempertimbangkan sistem informasi dan teknologi serta penegakan hukum, serta menerapkan prinsip-prinsip *urban management* sesuai dengan kondisi setempat. Dalam pelaksanaannya diperlukan sinergitas antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dengan penekanan pada pemberdayaan masyarakat, kerjasama dengan lembaga keuangan, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dan kerangka kerjasama lainnya.

- a. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Ruang Terbuka Hijau
- b. Pengurangan ketimpangan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja
- c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota.

- d. Peningkatan ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat
- e. Penanggulangan dampak perubahan iklim
- f. Pengolahan kependudukan yang berkualitas
- g. Peningkatan perbaikan iklim investasi
- h. Pengelolaan pembiayaan pembangunan
- i. Pembangunan telematika jakarta

Isu Strategis Provinsi DKI Jakarta terkait Provinsi Banten

Keterkaitan isu-isu strategis Provinsi DKI dengan isu-isu strategis Provinsi Banten ditata dalam beberapa bidang penekanan yaitu:

1. Geografi.

- a. Keseluruhan luas wilayah DKI Jakarta 7.659,02 Km² yang meliputi 662,33 Km² daratan termasuk 110 pulau di Kabupaten Kepulauan Seribu dan 6.977.5 Km² Lautan, Terdapat 4 aliran sungai dari 17 Aliran sungai DKI Jakarta yang bersinggungan dengan kabupaten Kota di Provinsi Banten dan Terdapat 39 ruas jalan dengan panjang 155.687 km yang banyak bersinggungan dengan ruas jalan Kabupaten/Kota provinsi Banten. Berbagai moda transportasi pula melintas bersama di jalan Nasional yang menghubungkan Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten.
- b. Untuk menghadapi tantangan yang terjadi atas potensi kedua provinsi tersebut, perlu sepakati solusi dan strategi pembangunan bersama dalam menghadapi banjir, kemacetan lalu lintas, moda transportasi barang dan orang, dan penyediaan infrastruktur yang melayani kepentingan publik serta pemanfaatan bersama ruang terbuka hijau.

2. Demografi

- a. Provinsi DKI Jakarta terdiri dari 5 Kota dan 1 kabupaten Kepulauan pada 2016 jumlah penduduk 10.177.924 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 1.02 persen dengan luas wilayah 7.659,02 Km² maka kepadatan penduduk 15 366,87/km² , terdapat masyarakat miskin 412,8 ribu , dengan

tingkat pengangguran terbuka TPT 7,23 persen dan Tingkat Partisipasi Angkat Kerja (TPAK) 66.39 persen.

- b. Pembangunan manusia di Provinsi DKI Jakarta terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan terus meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DKI Jakarta. Pada tahun 2016, IPM DKI Jakarta telah mencapai 79,60. Angka IPM tersebut meningkat sebesar 0,61 poin dibandingkan IPM tahun lalu yang sebesar 78,99.
- c. Jumlah tindak kejahatan/pelanggaran kamtibmas tahun 2014 sebanyak 14.44 kejadian. Jumlah anggota polisi pada tahun 2013 sebanyak 9.090 orang dimana mengalami penurunan bila dibandingkan tahun 2012 (10.408 orang).
- d. Dengan Potensi DKI Jakarta yang berbatasan langsung dengan Provinsi Banten, perlu di tingkatkan pengelolaan kependudukan yang lebih ketat dan berkualitas serta peningkatan ketentraman, keamanan dan ketertiban masyarakat secara bersama-sama.

3. Ekonomi

- a. Pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta pada tahun 2016 mencapai 5.85 persen yang berarti melampaui nasional sebesar 5,02 persen dan sedikit turun dibandingkan 5,89 persen (yoy) pada tahun 2015 silam dengan tiga sektor kontribusi terbesar dalam PDRB atas dasar harga berlaku yaitu Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 16,69, Industri Pengolahan 13,84 persen, dan konstruksi 12,89.

Jumlah proyek investasi asing dan dalam negeri 3282 proyek dengan nilai Rp 19.132.118 (juta).

Sedangkan Laju pertumbuhan ekonomi pada periode 2016 di Provinsi Banten 5,26 persen lebih tinggi rata rata nasional 5,04 persen dengan tiga sektor kontribusi terbesar dalam PDRB atas dasar harga berlaku yaitu Industri Pengolahan 32,61 persen, Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 11,94 dan Transportasi dan Pergudangan 10,72.

- b. Melihat potensi yang besar dari lingkungan provinsi DKI Jakarta, dan beberapa keunggulan Provinsi Banten anatara lain

transportasi dan pergudangan atau dari potensi yang lain di provinsi Banten.

4. Kerjasama

- a. Posisi DKI Jakarta Sebagai ibukota Negara sangat strategis sebagai mitra kerjasama Provinsi Provinsi sebagai penyangga ibu kota yang perlu di perkuat dengan infrastruktur, yang dapat memperlancar arus barang dan penumpang.

Melihat potensi dari kedua Provinsi yang saling berbatasan langsung sangat dimungkinkan kerjasama dari berbagai aspek antara lain infrasturktur pendukungn bagi DKI Jakarta, Transportasi, Parawisata, Perdagangan, Investasi dan teknologi informasi dan telematika.

4.4.3 Provinsi Lampung

- a. Pada tahun 2015, ASEAN menjadi pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal dimana terjadi arus barang, jasa, investasi, dan tenaga terampil yang bebas, serta arus modal yang lebih bebas diantara Negara ASEAN. Dengan terbentuknya pasar tunggal yang bebas tersebut maka akan terbuka peluang bagi Indonesia untukmeningkatkan pangsa pasarnya di kawasan ASEAN;
- b. Provinsi Lampung berada pada Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I dengan konsekwensi Provinsi Lampung berada pada jalur laut/udara yangterbuka dengan dunia luar sehingga bisa dilalui kapal dan pesawat udara asing, kondisi ini bisa dimanfaatkan menjadi jalur perdagangan ilegal (*human trafficking, ilegal fishing, ilegal logging*);
- c. Lokasi strategis Provinsi Lampung menjadi pintu gerbang Pulau Sumatera namun daya dukung infrastruktur seperti jaringan transportasi darat baik lintas timur maupun lintas barat guna memperlancar arus barang dan orang dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa dan sebaliknya dalam kondisi rusak;
- d. Persaingan antar daerah yang ketat di mana efisiensi, produktivitas dan nilai tambah menjadi pertimbangan kinerja, menjadikan Provinsi Lampung relatif tertinggal dibanding daerah lain yang lebih efisien dan produktif dalam menciptakan nilai tambah yang tinggi. Sehingga berakibat pada beratnya peningkatan keunggulan daerah (komparatif dan kompetitif) secara sektoral, komoditas dan jasa unggulan;

- e. Dengan adanya penerapan standardisasi barang dan jasa yang dikaitkan dengan isu lingkungan, HAM, dan buruh berakibat menjadi terhambatnya perdagangan akibat lemahnya pemahaman isu global. Hal ini menuntut Pemda perlu melakukan pengembangan kebijakan yang responsif terhadap isu, kesepakatan dan hukum internasional;
- f. Adanya perubahan teknologi dan informasi harus dilihat sebagai potensi untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Hal ini menuntut untuk dilakukan pengembangan ekonomi kreatif dan berbasis iptek (*knowledge-based economy*);
- g. Di alam demokrasi sekarang ini proses politik menjadi mahal sehingga menimbulkan pemborosan uang negara yang merupakan investasi yang tidak produktif. Pemerintah dan Pemerintah daerah perlu melakukan percepatan konsolidasi demokrasi untuk mencegah pemborosan yang lebih besar lagi;
- h. Terjadinya konflik kepentingan antara legislatif dan eksekutif yang mengakibatkan tidak optimalnya kinerja birokrasi dalam pelayanan Publik;
- i. Ketidapastian hubungan pusat, provinsi dan kabupaten/kota telah memunculkan lemahnya koordinasi dan sinergi pusat-daerah, tidak optimalnya pengelolaan anggaran negara dan daerah, dan konflik antar daerah. Karena itu pemerintah harus mengembangkan forum-forum kerjasama antardaerah;
- j. Rendahnya mutu layanan publik: Standar Pelayanan Minimal mengakibatkan lambatnya peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah. Diperlukan regulasi pemerintah yang bertujuan mengembangkan dan pelaksanaan manajemen berbasis kinerja;
- k. Lemahnya manajemen sumberdaya dan asset daerah: tata ruang, SDA, tanah, dan laut telah mengakibatkan tidak optimalnya pengelolaan sumberdaya secara berkelanjutan sehingga meningkatkan kerusakan lingkungan. Perlu upaya penataan dan pengembangan manajemen sumber daya dan asset daerah, perencanaan tata ruang dan tata guna lahan;
- l. Lemahnya manajemen sumberdaya dan asset daerah: tata ruang, SDA, tanah, dan laut telah mengakibatkan tidak optimalnya pengelolaan sumberdaya secara berkelanjutan sehingga meningkatkan kerusakan lingkungan. Perlu upaya penataan dan pengembangan manajemen

sumber daya dan asset daerah, perencanaan tata ruang dan tata guna lahan;

- m. Belum berjalannya reformasi birokrasi daerah telah memunculkan ketidakpastian dan kelambanan, karenanya dibutuhkan pengembangan sistem insentif dan disinsentif;
- n. Lemahnya kerjasama dan kemitraan pemerintah dan swasta mengakibatkan rendahnya investasi, pemerintah perlu melakukan perencanaan dan pengembangan kerjasama pemerintah dan swasta.
- o. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan yang terendah di Pulau Sumatera yaitu hanya 72,45 Perkembangan jumlah penduduk Provinsi Lampung dengan laju pertumbuhan $\pm 1,23$ persen selama 10 tahun terakhir, memberikankan konsekuensi dari kondisi tersebut adalah ketersediaan ruang, lapangan kerja, dan lain-lain dengan tetap memperhatikan keseimbangan dengan sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
- p. Masih tinggi angka kemiskinan di Lampung yaitu 14,86 persen, masih diatas rata-rata nasional sekitar 11,66 persen;
- q. Kerusakan hutan di Provinsi Lampung hingga tahun 2012 sudah mencapai 55 persen dari luas yang ada akibat berbagai tekanan pembangunan dan aktivitas masyarakat. Potensi ekonomi dari kawasan hutan berupa hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan dan keanekaragaman hayati belum termanfaatkan secara maksimal;
- r. Beberapa daerah-daerah berpotensi ekonomi (Tanggamus, Lampung Barat, Lampung Timur, Mesuji, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Lampung Selatan, Lampung Utara dan Way Kanan) belum terlayani oleh sarana dan prasarana yang memadai;
- s. Masih banyaknya lahan-lahan produktif di wilayah kabupaten yang belum termanfaatkan secara optimal;
- t. Terjadinya disparitas pembangunan antar wilayah, khususnya antara Bandar Lampung sebagai ibukota Provinsi dengan kabupaten-kabupaten di Provinsi Lampung;
- u. Menurunnya daya dukung lingkungan yang ditandai dengan semakin tingginya frekuensi terjadinya bencana banjir pada musim hujan dan terjadinya kelangkaan air pada musim kemarau;

- v. Kerusakan ekosistem pesisir dan pantai, pendangkalan dan pencemaran sungai, semakin meningkatnya polusi udara di lingkungan perkotaan, dan semakin punahnya fauna dan flora lokal;
- w. Masih tingginya konflik pertanahan antara masyarakat dengan pemerintah (negara) dan masyarakat dengan perusahaan (negara/swasta);
- x. Adanya peningkatan penggunaan teknologi dan informasi harus dilihat sebagai potensi yang mendukung percepatan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan di daerah Kabupaten/Kota.

Keterkaitan dengan isu-isu strategis Provinsi Banten

Keterkaitan isu-isu strategis provinsi Lampung dengan isu-isu strategis Provinsi Banten ditata dalam beberapa bidang kajian yaitu:

1. Geografi

- a. Luas wilayah Provinsi Banten 9.662,92 Km² dan Provinsi Lampung 35.288,35 km² keduanya berdampingan termasuk dalam Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALK I) melintasi Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Laut Jawa - Selat Sunda, secara khusus selat sunda. Alur laut yang ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan berdasarkan konvensi hukum laut internasional. Alur ini merupakan alur untuk pelayaran dan penerbangan yang dapat dimanfaatkan oleh kapal atau pesawat udara asing diatas laut tersebut untuk dilaksanakan pelayaran dan penerbangan damai dengan cara normal. Penetapan ALKI dimaksudkan agar pelayaran dan penerbangan internasional dapat terselenggara secara terus - menerus, langsung dan secepat mungkin serta tidak terhalang oleh perairan dan ruang udara teritorial Indonesia . 35.288,35 km²
9.662,92;
- b. Posisi yang strategis yang dipisahkan dengan perairan selat sunda mewaspadai kedua belah pihak dengan area terbuka tersebut rawan terhadap *illegal logging*, *illegal fishing*, *illegal immigration* dan *human trafficking*, untuk itu hal yang bersifat keamanan nasional yang lebih luas dan pengaturan lalu lintas yang baik perlu di lengkapi dengan traffic Separation Scheme (TSS), Integrated Maritime surveillance System (IMSS) dan under

water Detection yang dapat bekerjasama dengan stakeholder Kementrian Kemaritiman dan TNI Angkatan Laut;

- c. Posisi strategis tersebut dapat lebih meningkatkan perekonomian melalui arus barang, arus penumpang dan jasa melalui jalur laut nasional sekunder dan jalur utama darat tol trans Jawa, tol trans Sumatra.

2. Demografi

- a. Provinsi Banten dengan 4 Kabupaten dan 4 kota, berpenduduk 12.203.148 jiwa yang menempati luas wilayah 9.662,92 km² dengan kepadatan penduduk 1178.91 jiwa/km sedangkan Penduduk Provinsi Lampung dengan 12 Kabupaten, 2 Kota 9.499.116 jiwa, kepadatan 215.07 jiwa/km², merupakan kondisi yang sangat kontras dimana Provinsi Banten dengan luas wilayahnya berpenduduk besar sedangkan Provinsi Lampung dengan luasan wilayah besar berpenduduk sedikit;
- b. IPM Banten sendiri pada tahun 2016 ini baru mencapai 70,96. Berarti, jaraknya dari yang ideal masih kurang 29,04 persen. Adapun status pembangunan manusianya masih tetap berkategori “Tinggi” ($70 \leq \text{IPM} < 80$). Betapapun juga, dengan angka IPM sebesar itu, capaian pembangunan manusia Banten berada pada peringkat tertinggi ke delapan di Indonesia, sedangkan Tingkat tercatat sebesar 5,42 persen dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 658,11 ribu jiwa. Provinsi Lampung memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan yang terendah di Pulau Sumatera yaitu hanya 72,45; Perkembangan jumlah penduduk Provinsi Lampung dengan laju pertumbuhan $\pm 1,23$ persen selama 10 tahun terakhir menyisakan masih tinggi angka kemiskinan di Lampung yaitu 14,86 persen, masih diatas rata-rata nasional sekitar 11,66 persen;memberikan konsekuensi dari kondisi tersebut adalah ketersediaan ruang, lapangan kerja, dan lain-lain dengan tetap memperhatikan keseimbangan dengan sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
- c. Kedua provinsi perlu bijaksana dan hati-hati dalam mengelola arus orang bergerak dan tinggal dengan memperketat dalam

pengelolaan kependudukan dan catatan sipil sehingga kedua daerah tersebut terjadi pertumbuhan penduduk yang alami, seimbang dan proporsional.

3. Ekonomi

- a. Laju pertumbuhan ekonomi pada periode 2016 di Provinsi Banten 5,26 persen lebih tinggi rata rata nasional 5,04 persen dengan tiga sektor kontribusi terbesar dalam PDRB atas dasar harga berlaku yaitu Industri Pengolahan 32,61 persen, Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 11,94 dan Transportasi dan Pergudangan 10,72. Provinsi kurun waktu 2009-2013 di Provinsi Lampung Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,97 persen, dan pada periode triwulan I-2017 sebesar 5,11 persen dengan tiga sektor kontribusi terbesar dalam PDRB atas dasar harga berlaku yaitu Pertanian, kehutanan, perikanan 32,28 persen, Indutri pengolahan 18,11 persen, Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 11,08 persen;
- b. Pertumbuhan ekonomi dan tiga kontribusi sektor terbesar pada pada masing-masing daerah terdapat perbedaan yang menunjukkan keunggulan dan persamaan yang menjadi tren nasional, sehingga hal ini menjadi peluang yang intensif dalam beberapa sektor antara lain, sektor transportasi dan pergudangan di Provinsi Banten dapat mendukung pada Provinsi Lampung, sedangkan kesamaan pertumbuhan pada sektor industri pengolahan dan Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor perlu di jaga dengan iklim ekonomi yang kondusif.

4. Kerjasama

- a. Posisi Provinsi Banten berdampingan Provinsi Lampung ini, dengan potensi geografi, demografi dan perekonomian dapat saling menguatkan dan saling melengkapi kekurangan dan kelebihanannya untuk menunjang kesejahteraan masyarakat;

- b. Dari perjalanan waktu dan data, informasi rintisan telah dilakukan kerjasama yang dapat di tindak lanjuti antarabidang pariwisata, Pertanian, listrik dan gas, perdagangan, investasi, ketahanan pangan dan mplementasi teknologi informasi.

4.5 ISU STRATEGIS TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BANTEN 2010-2030

Beberapa isu strategis yang terdapat di Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

1. Perkembangan kondisi perekonomian nasional yang mendorong orientasi pembangunan daerah menuju sektor pertanian dan kawasan perdesaan dengan pendekatan ekonomi kerakyatan. Reorientasi mendorong dikembangkannya paradigm perencanaan pembangunan yang mengurangi ketergantungan pada *trickle down effect* pusat pertumbuhan berbasis sektor industri dan sektor tersier di kawasan perkotaan serta pilihan basis perekonomian pada sektor pertanian dengan penajaman komoditi yang tangguh terhadap perubahan pasar global.
2. Kebijaksanaan menuju perluasan otonomi daerah yang membawa implikasi terhadap posisi dan fungsi rencana tata ruang dalam perkembangan pembangunan menurut hirarki pemerintahan. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Banten perlu diposisikan secara tepat pada arah kebijaksanaan tersebut, sehingga mampu berperan sebagai instrumen pencapaian tujuan pembangunan melalui pembentukan ruang secara regional planning.
3. Ketidakseimbangan pertumbuhan (*imbalance growth*) antar Wilayah Banten Selatan dan Wilayah Banten Utara di Provinsi Banten, berdampak pada ketidakseimbangan pertumbuhan, serta akan mempertajam kesenjangan kesejahteraan sosial-ekonomi (disparitas) yang dapat mengganggu ketertiban proses pembangunan. Azas demokratisasi ruang dan sinergi wilayah perlu melandasi RTRW Provinsi Banten dalam mengatasi kesenjangan antar wilayah tersebut, dengan mengakomodir RTRW Kabupaten/Kota serta keterikatan dengan RTRW Jawa-Bali.

4. Pelestarian lingkungan hidup merupakan isu yang perlu dipertimbangkan dalam RTRW Provinsi Banten, terutama menyangkut okupansi kawasan lindung dan masalah pencemaran lingkungan. Untuk itu perlu dilakukan upaya mempertahankan Kawasan Lindung di Provinsi Banten untuk meningkatkan daya dukung lingkungan yaitu Kawasan Akarsari dan DAS Cidanau.
5. Eksplorasi bahan tambang dan mineral sebagai bagian peningkatan pendapatan daerah perlu dilakukan melalui pendekatan pembangunan yang berkelanjutan, sehingga persoalan lingkungan dapat dikurangi. Selain itu, perlu adanya keseimbangan kesempatan berusaha bagi masyarakat setempat untuk menghindari kecemburuan sosial ekonomi.
6. Peningkatan sarana dan prasarana transportasi darat, udara dan laut yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan baru untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat secara bijaksana dan optimal.

4.6 ISU STRATEGI WILAYAH KABUPATEN/KOTA PROVINSI BANTEN

4.6.1 Kota Tangerang

Yang menjadi isu strategis utama dalam pembangunan di kota Tangerang adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Pendidikan;
2. Peningkatan Kualitas pelayanan Kesehatan;
3. Pengurangan Genangan dan Titik Banjir;
4. Pengembangan transportasi massal;
5. Penataan Ruang Kota yang Berkelanjutan dan penyediaan ruang publik;
6. Pemberdayaan masyarakat miskin;
7. Perluasan Kesempatan kerja dan peningkatan daya saing tenaga kerja;
8. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Ekonomi Lokal;
9. Peningkatan Pelayanan Publik dan Profesionalisme aparatur Pemerintah.

Isu strategis terkait dengan rencana tata ruang dan wilayah sebagai berikut :

1. Pengembangan jaringan jalan berpola grid radial utara – selatan dan timur – barat. Koridor utara – selatan menghubungkan Bandara Soekarno – Hatta sampai dengan Kabupaten Tangerang sedangkan jalur barat – timur untuk menghubungkan pergerakan Jakarta – Kota Tangerang – Kabupaten Serang. Di samping itu juga ada rencana pembangunan jalan di kiri dan kanan jalan bebas hambatan sehingga dapat membuka akses dan peluang investasi pada sepanjang koridor tersebut;
2. Ada rencana pembangunan kota baru Tangerang sebagai CBD, yaitu sebagai pusat pemerintahan dan sebagai pusat bisnis Kota Tangerang sekaligus menangkap peluang luberan dari DKI Jakarta;
3. Isu lainnya yaitu pembangunan stasiun KA di Kota Tangerang sebagai titik awal dan akhir perjalanan regional, sehingga arus lalu lintas orang dan barang dapat ditangkap/diberangkatkan dari Kota Tangerang. Pembangunan stasiun KA tersebut sebagai penyeimbang keberadaan stasiun KA Gambir, sekaligus untuk memudahkan perjalanan dari-dan-menuju Bandara Soekarno Hatta yang akan lebih mudah dijangkau dari Kota Tangerang dibandingkan dari stasiun KA Gambir.

4.6.2 Kota Tangerang Selatan

Yang menjadi isu strategis dalam pembangunan di kota Tangerang Selatan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan struktur dan pelebaran ruas jalan BSD Serpong-Parung;
2. Peningkatan struktur dan pelebaran ruas jalan Serpong-Ciputat-Simpang Gaplek-Sawangan;
3. Penataan Geometri perempatan jalan untuk mengatasi kemacetan perkotaan;
4. Belum selesainya Jalan Siliwangi yang sudah dimulai pembangunannya dari tahun 2013;

5. Pelebaran jalan provinsi yang melintasi Tangerang Selatan, seperti Jalan Pondok Cabe – Cirendeu;
6. *Flyover* Pasar Serpong dan *underpass* Pasar Jombang;
7. Perbaikan drainase kota untuk menangani banjir tahunan;
8. Percepatan pembangunan TPSA Cipeucang dan optimasi armada persampahan dan TPS Regional;
9. Percepatan pembangunan monorel/RLT Tangerang Selatan-Bandara Soekarno-Hatta dan monorel /RLT Lebak Bulus-Puspiptek;
10. Pengembangan Kawasan Pusat Pertumbuhan Kecamatan Setu;
11. Percepatan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Selatan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
12. Mengoptimalkan produksi tanaman hortikultura khususnya komoditas Anggrek dan Phylodendron;
13. Revitalisasi pasar Tradisional;
14. Pembangunan Terminal Pondok Cabe.

Isu strategis terkait dengan rencana tata ruang dan wilayah sebagai berikut :

1. Keberadaan Lapangan Terbang Pondok Cabe sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kota, sehingga perlu pengembangan kawasan untuk mendukung pengembangan potensi unggulan daerah;
2. Belum tersedianya Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Selatan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan.

4.6.3 Kota Serang

Yang menjadi isu strategis dalam pembangunan di Kota Serang adalah sebagai berikut:

1. Reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;

2. Aparatur yang berintegritas, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera;
3. Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel
4. Pelayanan publik yang berkualitas;
5. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan;
6. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan;
7. Penyediaan infrastruktur wilayah yang memadai bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat;
8. Pengendalian pemanfaatan ruang guna menjamin keberlanjutan pembangunan serta pengendalian bencana alam;
9. Revitalisasi sektor pertanian, pariwisata, perdagangan dan jasa, serta UKM dan Koperasi guna mengentaskan kemiskinan;
10. Peningkatan iklim investasi yang kondusif bagi berkembangnya sektor industri, perdagangan dan jasa berbasis pemanfaatan sumber daya setempat dalam rangka memperluas kesempatan kerja;
11. Optimalisasi peran serta masyarakat dalam rangka pengendalian penyakit masyarakat dan masalah sosial lainnya, menciptakan ketentraman dan ketertiban, serta iklim sosial dan politik yang kondusif bagi terlaksananya pembangunan daerah;
12. Peningkatan daya saing daerah melalui pembinaan prestasi olahraga, seni dan budaya daerah, serta kewirausahaan di kalangan pemuda.

Isu strategis terkait dengan rencana tata ruang dan wilayah sebagai berikut :

1. Pengembangan Wilayah Serang Utara Terpadu;
2. Dibangunnya bendungan Sindangheula untuk mengairi kawasan industri;
3. Mempertahankan dan penataan keberadaan situs Banten Lama.

4.6.4 Kota Cilegon

Yang menjadi isu strategis dalam pembangunan di Kota Cilegon adalah sebagai berikut:

1. Kualitas dan Daya Saing Perekonomian;
2. Penataan Ruang dan Kelola SDA-LH;
3. Kualitas SDM dan Kesejahteraan Sosial;
4. Daya Dukung, Sarpras dan Fasilitas Kota;
5. Kinerja Pemerintahan, Pelayanan dan Kamtib, Demokrasi, Hukum.

Isu strategis terkait dengan rencana tata ruang dan wilayah sebagai berikut :

1. Rencana pembangunan Bendungan Cidanau sebagai jaringan sumber daya air bagi kebutuhan air baku industri serta sebagai jaringan air baku untuk kebutuhan air minum di Wilayah Kota Cilegon dan sekitarnya;
2. Pengembangan Pelabuhan Regional Warnasari;
3. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

4.6.5. Kabupaten Tangerang

Yang menjadi isu strategis dalam pembangunan di Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut:

1. Angka laju pertumbuhan ekonomi (LPE) tahun 2015 yang sebesar 5,39 persen masih harus terus ditingkatkan dalam rangka penyerapan tenaga kerja (mengurangi pengangguran);
2. Angka indeks pembangunan manusia (IPM) tahun 2015 adalah 70,05 yang berarti menyamai IPM provinsi Banten yang sudah menembus batas angka 70, namun demikian hal itu masih perlu ditingkatkan lagi dalam rangka kualitas SDM yang lebih baik lagi;
3. Tingkat urbanisasi dan migrasi yang meningkat sementara angka laju pertumbuhan penduduk (LPP) adalah sebesar 3,24 persen yang berada di atas angka rata-rata nasional;

4. Angka tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) tahun 2015 adalah sebesar 62,46 persen, sedangkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) mencapai 9 persen. Kondisi kinerja ketenagakerjaan masih harus terus diperbaiki;
5. Seiring dengan pertumbuhan urbanisasi dan migrasi, dimana kabupaten Tangerang adalah termasuk daerah penyangga ibukota DKI Jakarta maka pertumbuhan pemukiman dan kekumuhan di wilayah kabupaten Tangerang adalah sesuatu yang sulit dihindari. Akibatnya keindahan dan keteraturan kabupaten Tangerang akan terganggu;
6. Daerah penyangga ibukota DKI Jakarta juga menjadikan kabupaten Tangerang mengalami kemacetan lalu lintas. Hal ini terutama terjadi ketika jam berangkat kerja di pagi hari dan pulang kerja di sore-malam hari;
7. Angka kemiskinan masih harus terus ditekan dari posisi yang sekarang karena hal ini mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di wilayah kabupaten Tangerang;
8. Masih tingginya angka kematian ibu dan bayi (AKI-AKB) serta keberadaan penyakit menular yang mengganggu kinerja pembangunan kesehatan di wilayah kabupaten Tangerang.

Isu strategis terkait dengan rencana tata ruang dan wilayah sebagai berikut :

1. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah Regional di Kabupaten Tangerang;
2. Pengembangan Kawasan Industri maritim di kabupaten Tangerang;
3. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

4.6.6. Kabupaten Serang

Yang menjadi isu strategis dalam pembangunan di kabupaten Serang adalah sebagai berikut:

1. Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial

- Angka indeks pembangunan manusia (IPM) yang pada posisi 64,49 Point;
- Persentase kemiskinan yang mencapai 20,75 persen dari total penduduk;
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang mencapai 14,8 persen.

2. Ketersediaan dan Kualitas Pelayanan Infrastruktur

- 500 Km jalan Kabupaten kondisi belum mantap;
- 601 Ruang Kelas SD, 97 Ruang Kelas SMP dan 113 Ruang Kelas SMA / SMK dalam kondisi rusak;
- 14 Puskesmas memerlukan perbaikan / perawatan .

3. Penataan Ruang, Permukiman, Pengelolaan Bencana dan Lingkungan Hidup

4. Pemerataan dan Kualitas Perekonomian

5. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik serta Kualitas Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat

Isu strategis terkait dengan rencana tata ruang dan wilayah sebagai berikut :

1. Penataan kawasan perbatasan di Kabupaten Serang dan sekitarnya;
2. Penambangan di kawasan hutan Gunung Gede dapat mempertinggi volume aliran permukaan, menyebabkan banjir dan longsor serta mengurangi peresapan air tanah;
3. Pengembangan Kawasan Pusat Distribusi Regional di Kecamatan Petir;
4. Pengembangan potensi pariwisata di Kecamatan Padarincang untuk meningkatkan sektor kepariwisataan Provinsi Banten;
5. Perlu pengembangan kawasan industri yang ditetapkan dalam satu kawasan untuk menampung industri-industri baru dan industri yang berada di luar kawasan.

4.6.7. Kabupaten Lebak

Yang menjadi isu strategis dalam pembangunan di kabupaten Lebak adalah sebagai berikut:

1. Aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan;
2. Kemiskinan dan ketenagakerjaan;
3. Iklim investasi dan daya saing daerah;
4. Ketahanan pangan;
5. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah;
6. Pengendalian pemanfaatan ruang dan kelestarian lingkungan hidup.

Isu strategis terkait dengan rencana tata ruang dan wilayah sebagai berikut :

1. Kabupaten Lebak memiliki Bendungan Karian di empat kecamatan namun lebih dikenal/terkonsentrasi di Kecamatan Sajira sebagai salah satu dam strategis nasional karena akan dipakai untuk suplai air baku ke Jakarta, Cilegon, dan Tangerang, dengan kapasitas 208.000.000 M³ dan luasnya hampir 1.774 Ha. Untuk itu maka perlu dilakukan upaya-upaya untuk mewujudkan pembangunan Bendungan Karian di Kabupaten Lebak untuk memenuhi kebutuhan air baku bagi Kawasan Perkotaan, Kawasan Bojonegara, dan untuk mempertahankan ketahanan pangan (lumbung padi);
2. Rencana pengembangan kawasan industri yang didukung potensi pertambangan dibagian selatan, di Kecamatan Bayah;
3. Pengembangan kawasan pariwisata geologi di selatan Kabupaten Lebak;
4. Pengembangan Kawasan Perumahan Kota Baru Publik Maja di Wilayah Kabupaten Lebak yang perlu didukung pembangunan infrastruktur;
5. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

4.6.8. Kabupaten Pandeglang

Yang menjadi isu strategis dalam pembangunan di kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikut:

1. Kualias sumber daya manusia masih rendah, permasalahan ini terkait dengan masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dan kurang berdayanya masyarakat khususnya di perdesaan;

2. Penataan ruang dan kawasan/kewilayahan kabupaten Pandeglang masih belum optimal. Hal ini terkait dengan belum adanya tata guna lahan yang terintegrasi dan sinergis dengan pembangunan yang diprioritaskan sesuai dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan yang ada. Selain itu, permasalahan tersebut terkait dengan belum optimalnya fungsi kawasan dan tata ruang wilayah;
3. Sarana dan prasarana dasar belum memadai, permasalahan ini terkait dengan kurang optimalnya sarana dan prasarana publik khususnya sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, dan jalan serta sarana dan prasarana penunjang perekonomian;
4. Belum optimalnya pemanfaatan potensi unggulan daerah, permasalahan ini terkait dengan masih dilakukannya aktivitas perekonomian barang mentah pada sektor unggulan, belum dilakukannya aktivitas perekonomian pada sektor unggulan dengan meningkatkan nilai tambah dan nilai rantainya;
5. Pertumbuhan ekonomi daerah belum menunjukkan tingkat perkembangan yang signifikan, permasalahan ini khususnya terkait dengan belum optimalnya iklim investasi yang prospektif dan kondusif, serta belum berkembangnya jiwa kewirausahaan;
6. Tata kelola dan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah masih lemah, permasalahan ini terkait dengan masih lemahnya kapasitas kelembagaan dan kualitas aparatur pemerintahan daerah.

Isu strategis terkait dengan rencana tata ruang dan wilayah sebagai berikut :

1. Rencana pembangunan lapangan terbang perintis Banten Selatan di Kabupaten Pandeglang. Rencana pembangunan lapangan terbang perintis tersebut dilakukan dari Departemen Perhubungan Pusat pada tahun 2005, di samping untuk percepatan pembangunan daerah juga mempertimbangkan keberadaan potensi pariwisata khusus Tanjung Lesung, Carita, di Kabupaten Pandeglang;
2. Penataan Kawasan agroindustri di Kabupaten pandeglang;

3. Untuk pengembangan bagian selatan Provinsi Banten pada umumnya dan Kabupaten Pandeglang pada khususnya perlu peningkatan jalan nasional yang menghubungkan bagian selatan Provinsi Banten maupun Kabupaten Pandeglang dengan bagian utara wilayah tersebut;
4. Penanggulangan banjir di selatan Kabupaten Pandeglang;
5. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

4.6.9 Kota Tangerang Selatan

1. Pengembangan dan penataan Transportasi di Kota Tangerang Selatan;
2. Pengembangan kawasan Lapangan Terbang Pondok Cabe selain fungsi pertahanan.

4.6.10. Kerjasama Wilayah Kerja Pembangunan I

Kesepakatan Wilayah Kerja Pembangunan I telah ditandatangani pada tanggal tujuh april dua ribu enam belas , nomor : 415.4/865-KH4L/2016, Nomor : 100/08/-Bag.KP/2016, Nomor : 134.43/659-Pem/Setda/2016. Kerjasama pembagunan antara Bupati Tangerang, Walikota Kota Tangerang, dan Walikota Kota Tangerang Selatan dengan maksud dan tujuan dalam rangka percepatan pengembangan daerah perbatasan, peningkatan kerjasama pengelolaan potensi daerah untuk peningkatan pelayanan publik yang berkualitas, efektif dan efisien bagi masyarakat, dan berlaku dua belas bulan dan dapat diperpanjang dua belas bulan berikutnya. Tindak lanjut dari kerjasama pembangunan wilayah ini meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, penendalian dan evaluasi pada bidang-bidang yang dikerjasamakan yaitu :

1. Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan riset;
2. Bidang Kesehatan;
3. Bidang infrastruktur dan penataan ruan;
4. Bidang pembangunan pilar batas daerah;
5. Bidang lingkungan hidup;
6. Bidang Sumber daya air;

7. Bidang Sosial;
8. Bidang Ketenagakerjaan;
9. Bidang Aset dan pemerintahan umum;
10. Bidang Perhubungan, Transportasi, Komunikasi, dan Informasi;
11. Bidang Investasi, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM;
12. Bidang Ketertiban Umum;
13. Bidang Kependudukan dan fasilitas umum;
14. Bidang Mitigasi Bencana;
15. Bidang Kepegawaian.

4.6.11. Kerjasama Wilayah Kerja Pembangunan II

Pada wilayah pembangunan satu telah ditandatangani pada tanggal dua puluh april dua ribu lima belas, Nomor : 100/872-Bapp/2015, Nomor: 100/01-PEMT/V/2015, Nomor : 100/08-Bappeda/2015. Kerjasama pembagunan antara Bupati Serang, Walikota Kota Serang, dan Walikota Kota Cilegon dengan maksud dan tujuan dalam rangka percepatan pengembangan daerah perbatasan, peningkatan kerjasama pengelolaan potensi daerah untuk peningkatan pelayanan publik yang berkualitas, efektif dan efisien bagi masyarakat di wilayah SERAGON, dan berlaku dua belas bulan dan dapat diperpanjang dua belas bulan berikutnya. Tindak lanjut dari kerjasama pembangunan wilayah ini meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pada objek yang dikerjasamakan yaitu :

1. Bidang Lingkungan hidup;
2. Bidang Penataan ruang;
3. Bidang perhubungan;
4. Bidang Parawisata.

Didalam naskah kerjasama tersebut, tertera terkait dengan analisis SWOT dan beberapa rumusan strategi pada bagian sebelumnya, para pemangku kepentingan di Wilayah Seragon juga telah mengidentifikasi isu-isu dan program strategis yang secara kewilayahan dapat menjawab kebutuhan pembangunan Seragon saat ini dan di masa depan. Isu-isu strategis ini telah

dikelompokkan ke dalam bidang-bidang pembangunan secara terperinci berikut ini.

ISU – ISU STRATEGIS SERAGON

A. Tata Ruang

1. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Seragon;
2. Penataan batas wilayah administrasi Kota Cilegon dengan Kab. Serang di batas Kecamatan Cibeber dengan Kecamatan Kramat Watu.

B. Pariwisata

1. Kerjasama pusat informasi dan pengembangan pariwisata Seragon;
2. Membuat atau membangun showroom untuk menampung hasil produk IKM/KUMKM kawasan pariwisata Seragon;
3. Peningkatan promosi produk - produk seragon di tingkat nasional dan internasional;
4. Membuat paket wisata sejarah serta bahari di Seragon;
5. Pelestarian kekayaan budaya Wilayah Seragon.

C. Transportasi

1. Penyelenggaraan angkutan masal Wilayah Seragon;
2. Membangun jaringan jalan khusus jalan kota dan jalan ke kawasan industri;
3. Percepatan penyelesaian jalan lingkar selatan Kota Cilegon;
4. Penataan trayek angkutan umum;
5. Penertiban parkir membuka lahan parkir;
6. Rekayasa lalu lintas simpul tol Cilegon timur;
7. Penertiban jalan arteri utama perkotaan;
8. Pembangunan sistem angkutan umum masal metro Seragon;
9. Rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan di Cilegon dan Serang;
10. Sinergi penataan jaringan jalan perkotaan;
11. Penertiban kendaraan *overload* lintas kabupaten dan kota.

D. Lingkungan

1. Kerjasama peningkatan pengelolaan persampahan;
2. Penataan lingkungan kawasan hulu di wilayah Mamah untuk menanggulangi banjir di Cilegon.

E. Sumber daya manusia

1. Meningkatkan SDM di bidang entrepreneur;
2. Pendidikan perkoperasian dan peningkatan kualitas SDM;
3. Pelatihan pengemasan makanan (misal: sate bandeng jadi lebih tahan lama untuk oleh-oleh);
4. Meningkatkan dan membekali pendidikan dan keterampilan untuk usaha industri rumahan.

F. Kesehatan

1. Membangun pelayanan kesehatan terpadu.

G. Pendidikan

1. Meningkatkan pembinaan masyarakat religi untuk harmonisasi Seragon;
2. Standarisasi dan sertifikasi pelaku wisata dan KUMKM.

H. Kelembagaan

1. Forum komunikasi legislatif Seragon (badan kerjasama legislatif Seragon);
2. Koordinasi penanggulangan bencana dan gangguan lingkungan Seragon.

I. Koperasi dan KUMKM

1. Pembentukan jaringan usaha kecil dan menengah;
2. Dukungan pendirian Coopmart Retail Modern Koperasi;
3. Pelatihan untuk pemasaran dan desain kemasan produk UKM;
4. Pembangunan Diklat UKM;
5. Dibentuk forum (FGD) tiap bidang untuk menghasilkan;
 - a. Core event bermultiplier ekonomi;
 - b. Identifikasi pengembangan produk cinderamata;
 - c. Pembuatan *branding* wilayah agar bernilai jual ekonomi;
 - d. Pemberdayaan masyarakat;

- e. Peningkatan promosi yang tepat sasaran;
- f. Peningkatan peran / *networking* pihak terkait.

FOKUS PROGRAM SERAGON

Fokus program merupakan kelompok program terpilih yang dijadikan fokus/prioritas penanganan untuk dikerjasamakan. Program-program prioritas ini dipilih dari masukan berupa isu-isu strategi di atas. Maksud dari pengarahannya program prioritas ini adalah untuk memulai kerja sama Seragon pada bidang-bidang yang dianggap paling mendesak dan memiliki dampak yang signifikan dalam pembangunan wilayah. Berdasarkan masukan dari pemangku kepentingan di Wilayah Seragon dan dengan menggunakan metode *Paretto*, maka diperoleh daftar program prioritas untuk dikerjasamakan di Wilayah Seragon dengan fokus pada bidang transportasi dan penataan ruang:

A. Program Bidang Transportasi:

1. Penyelenggaraan angkutan masal Wilayah Seragon;
2. Membangun jaringan jalan khusus jalan kota dan jalan ke kawasan industri;
3. Percepatan penyelesaian jalan lingkar selatan Kota Cilegon;
4. Penataan trayek angkutan umum;
5. Penertiban parkir membuka lahan parkir;
6. Rekayasa lalu lintas simpul tol Cilegon timur;
7. Penertiban jalan arteri utama perkotaan;
8. Pembangunan sistem angkutan umum masal metro Seragon;
9. Rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan di Cilegon dan Serang;
10. Sinergi penataan jaringan jalan perkotaan;
11. Penertiban kendaraan *overload* lintas kabupaten dan kota.

B. Bidang Penataan Ruang

1. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Seragon;
2. Penataan batas wilayah administrasi Kota Cilegon dengan Kabupaten Serang di batas Kecamatan Cibeber dengan Kecamatan Kromat watu.

Kedua bidang tersebut di atas merupakan bidang untuk mengawali pelaksanaan kerja sama antardaerah di Wilayah Seragon agar lebih fokus. Bidang lain juga tidak kalah penting untuk dikerjasamakan dan akan segera ditindaklanjuti secara simultan seiring dengan berjalannya kegiatan kerja sama Seragon ini. Program-program tersebut di atas juga masih sangat mungkin untuk dikembangkan, terutama dengan mengakomodasi masukan-masukan dari pemangku kepentingan yang lebih luas, seperti tokoh masyarakat dan dari unsur legislatif.

4.7. ISU STRATEGIS INTERNASIONAL

Sustainable Development Goals (SDGs) dicanangkan sampai dengan tahun 2030, merupakan kelanjutan *Millenium Development Goals* (MDGs), yang telah berakhir tahun 2015. SDGs memiliki 5 pondasi yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan yang ingin mencapai tiga tujuan mulia di tahun 2030 berupa 1) mengakhiri kemiskinan, 2) mencapai kesetaraan dan 3) mengatasi perubahan iklim. Untuk mencapai tiga tujuan mulia tersebut, disusunlah 17 Tujuan Global berikut ini

1. Tanpa Kemiskinan;
2. Tanpa Kelaparan;
3. Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan;
4. Pendidikan Berkualitas;
5. Kesetaraan Gender;
6. Air Bersih dan Sanitasi;
7. Energi Bersih dan Terjangkau;
8. Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak;
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur;
10. Mengurangi Kesenjangan;
11. Keberlanjutan Kota dan Komunitas;

12. Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab;
13. Aksi Terhadap Iklim;
14. Kehidupan Bawah Laut;
15. Kehidupan di Darat;
16. Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian;
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

4.8 ISU STRATEGIS NASIONAL

Isu Strategis Pembangunan Wilayah Jawa-Bali

Dalam lingkup pembangunan nasional, kebijakan pengembangan wilayah diarahkan untuk mendorong percepatan pembangunan wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua dengan tetap mempertahankan momentum pertumbuhan di Wilayah Jawa-Bali dan Sumatera. Percepatan pembangunan wilayah ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, serta mengurangi kesenjangan.

Dalam konteks konsepsi pengembangan kewilayahan, Provinsi Banten merupakan bagian dari Wilayah Jawa, berkaitan hal tersebut maka isu strategis pengembangan yang harus dicermati adalah isu strategis di Wilayah Jawa-Bali yang meliputi:

- 1) Belum optimalnya potensi peningkatan nilai tambah dari aktivitas perdagangan internasional;
- 2) Semakin meningkatnya peran sektor sekunder (industri pengolahan) dan tersier (perdagangan dan jasa) dalam perekonomian;
- 3) Terancamnya fungsi wilayah Jawa-Bali sebagai salah satu lumbung pangan nasional;
- 4) Menurunnya daya dukung lingkungan;
- 5) Tingginya ancaman terorisme terhadap obyek vital;
- 6) Ketimpangan pembangunan intra-regional wilayah Jawa-Bali;
- 7) Menjaga momentum pertumbuhan di Jawa-Bali;
- 8) Tingginya tingkat pengangguran di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi;

- 9) Tingginya kepadatan dan konsentrasi penduduk di wilayah metropolitan Jabodetabek dan sekitarnya;
- 10) Tingginya kasus tindak pidana korupsi;
- 11) Tingginya tingkat kemiskinan perdesaan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan tingkat kemiskinan perkotaan di DI Yogyakarta;
- 12) Besarnya dampak bencana alam terhadap kehidupan dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat;
- 13) Rendahnya kapasitas dan daya saing SDM dalam menghadapi persaingan global.

Isu Strategis Perubahan Iklim Global

Indonesia memiliki posisi yang sangat penting dalam isu perubahan iklim global. Di satu sisi, Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, yang berpengaruh besar bagi kehidupan masyarakat seperti; terganggunya cuaca dan iklim yang berpengaruh terhadap musim tanam berbagai komoditas pertanian; timbulnya berbagai bencana banjir di berbagai tempat yang tidak saja mengganggu musim tanam dan panen namun juga kehidupan masyarakat; rusaknya infrastruktur dan pengikisan area pantai akibat kenaikan muka air laut; dan dampak negatif di bidang kesehatan. Indonesia sebagaimana Negara lain juga menyumbang emisi GRK. Sehubungan dengan itu, Indonesia menilai penting untuk melakukan langkah-langkah mengatasi dampak perubahan iklim dan juga mengurangi peluang timbulnya perubahan iklim dengan mengurangi emisi GRK yang menjadi penyebab perubahan iklim global.

Sebagai kelanjutan dari komitmen Presiden untuk menurunkan emisi GRK sebesar 26 persen pada Tahun 2020 dengan upaya sendiri dan sebesar 41 persen dengan dukungan internasional, diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 mengenai RAN-GRK. Selanjutnya Pada COP ke-21 Paris (2015), Presiden Joko Widodo menegaskan komitmen target penurunan emisi Indonesia dalam INDC sebesar 29 persen secara sukarela pada tahun 2030

Secara eksplisit Perpres menjabarkan komitmen Presiden dengan membagi sasaran penurunan emisi GRK ke dalam 5 (lima) sektor utama

yaitu Sektor Kehutanan, Sektor Pertanian, Sektor Energi dan Transportasi, Sektor Industri dan Sektor Persampahan selanjutnya adalah mengidentifikasi program dan kegiatan yang dapat mendukung pencapaian sasaran penurunan emisi.

Provinsi Banten salah satu penyumbang emisi Gas Rumah Kaca dari berbagai Sektor tersebut, dalam upaya mendukung program nasional penurunan emisi Gas Rumah Kaca Di Provinsi Banten telah berkomitmen yang tertuang dalam Peraturan Gubernur No 39 tahun 2012 mengenai Rencana Aksi Daerah Penurunan Gas Rumah Kaca (RAD-GRK), menetapkan aksi mitigasi Daerah di 6 Sektor yaitu sektor Pertanian, Sektor Kehutanan, Sektor Industri, Sektor Transportasi , sektor energi dan sektor Limbah

Dengan demikian di Provinsi Banten perlu dilakukan program dan kegiatan yang mendukung penurunan emisi Gas Rumah Kaca. Data Baseline dan proyeksi Emisi Gas Rumah Kaca sampai dengan 2020 berdasarkan perhitungan BAU (*Bussines as Usual*) adalah sebagai berikut:

Tabel 4.14
 Proyeksi Emisi Gas Rumah Kaca Tahun 2020

No	SEKTOR	TAHUN 2020 (Ton CO2 eq)	%
1	Pertanian	494.519	7,6
2	Kehutanan	5.299.858	81
3	Pengelolaan Limbah	605.945	9,3
4	Industri	2.492	0,04
5	Transportasi	1.648,93	0,03
6	Energi	137.613	2.1
	TOTAL	6.542.075,93	100

Sumber : SIPD Provinsi Banten

Tabel 4.15
 Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari 6 Sektor di Provinsi Banten
 berdasarkan Pegub 39 Tahun 2012

No	SEKTOR	TAHUN 2010 (Ton CO2 eq)	%	TAHUN 2020 (Ton CO2 eq)	%
1	Pertanian Peternakan	573.462	0.69	709,734	0.69
2	Kehutanan	5.861.511	7.08	11,723,022	11.41
3	Limbah	1,044,163	1.26	1,871,502	1.82
4	Industri	27,690.000	33.45	38,570,000	37.55
5	Transportasi	3,876,200	4.68	6,002,500	5.84
6	Energi	43,730.000	52.83	43,830,000	42.67
	TOTAL	81,800,608	100	103,215,484	100

Sumber : SIPD Provinsi Banten